



RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 347);
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN,
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
- BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA PD.

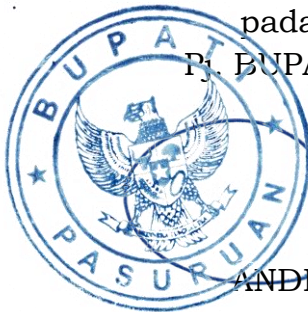
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

P. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;

- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;
- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Pasuruan dengan tetap mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra.

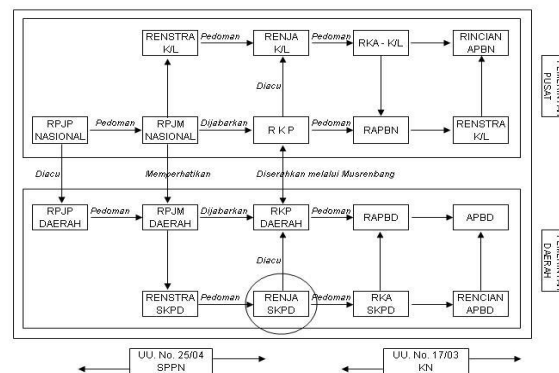
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Penyusunan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD/RPD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan merupakan Penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kejadian pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pasuruan merumuskan tema pembangunan daerah tahun 2025 yakni Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif. tema tersebut dijabarkan ke dalam 4 prioritas pembangunan daerah diantaranya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat, penguatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berdampak dan berbasis elektronik.

Rancangan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Penyusunan Renja PD nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian menjadi APBD. Berikut gambaran keterkaitan perencanaan penganggaran pusat maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 1.1 Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 Petunjuk Tehnis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang Terbuka Hijau;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
41. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
42. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air Di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
44. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
45. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 Tentang RPD Kab Pasuruan;
46. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026.
47. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pasuruan Tahun 2024.
48. Peraturan Bupati No Tahun 2024 tentang P-RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi acuan/ dasar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan.
2. Menyediakan dokumen resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan dalam rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan pada Tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.
3. Memuat pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan sebagai pelaksanaan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan serta menyusun anggaran pelaksanaan yang akan dilakukan Tahun 2025 sehingga mendukung tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan yang ada dalam RPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Dokumen Renja 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka akan disampaikan evaluasi tahun 2023.

Evaluasi Renja tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/ tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, serta penyusunan strategi yang perlu dilakukan untuk optimalisasi kinerja ditahun selanjutnya.

Hasil evaluasi digunakan untuk penyesuaian atau perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta perencanaan tahun kedepannya.

Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 disajikan melalui evaluasi pendapatan, evaluasi realisasi belanja serta evaluasi kinerja.

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Renja (Pendapatan) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
PENDAPATAN :				
- Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	1.691.000.000	1.663.524.800	27.475.200	98,38
- Retribusi Sewa Tempat Pemakaman / Pembakaran / Pengabuan Mayat	9.000.000	2.932.500	6.067.500	32,58
- Retribusi Pemakaian Laboratorium	400.000.000	467.280.300	(67.280.300)	116,82
- Pendapatan Dari Pengembalian	-	95.506.720	95.506.720	
JUMLAH PAD	2.100.000.000	2.229.244.320	(129.244.320)	106,15

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari beberapa OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi persampahan tahun 2023 memperoleh capaian sebesar 98,38%, dari retribusi pemakaman mencapai 32,58% dan dari retribusi Laboratorium Lingkungan mencapai 116,82%.

Retribusi persampahan tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu ketercapaiannya sebesar 98,38%, hal ini disebabkan adanya tunggakan dari wajib retribusi yang berasal dari kawasan pemukiman masyarakat, untuk meningkatkan capaian tahun depan perlu dilakukan forum konsultasi publik terkait pelayanan persampahan untuk menjaring masalah yang ada dilapangan sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut, dengan harapan adanya optimalisasi terkait hak dan kewajiban pelayanan persampahan termasuk capaian retribusinya.

Retribusi pemakaian laboratorium melebihi target yang ditetapkan, dimana ketercapaiannya sebesar 116,82%. UPT Laboratorium Lingkungan Kab. Pasuruan hanya melayani uji kualitas air limbah dimana tidak semua parameter uji bisa dilakukan, namun dengan banyaknya jumlah perusahaan atau industri yang merupakan sasaran atau customer target masih dapat tercapai. Melihat potensi industri yang besar dan ekstensifikasi jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh UPT Laboratorium, maka dukungan yang optimal dari Pemda Kab. Pasuruan sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan yang dapat berimbas pada peningkatan PAD dari pelayanan uji air limbah.

Retribusi sewa tempat pemakaman tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu ketercapaiannya hanya sebesar 32,58%, pemakaman yang dimaksud adalah lokasi pemakaman Cina di Kecamatan Purwosari, tidak mencapai target karena rendahnya penggunaan lahan pemakaman di lokasi tersebut.

Kondisi tahun 2024 mengenai pendapatan berbeda dengan tahun 2023, hal ini berdasarkan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan segala pertimbangan teknis dan social maka retribusi pemakaman sudah dihapus, sehingga pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan hanya menyisakan retribusi persampahan dan pelayanan uji air limbah di UPT Laboratorium.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah instrumen ekonomi yang penting dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu komitmen dan keseriusan untuk perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasinya dalam rangka optimalisasinya, dengan optimalnya PAD maka kemandirian APBD dalam hal pendapatan akan semakin tinggi.

Evaluasi realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan berdasarkan jenis belanja dan sumber anggaran. Berdasarkan jenis belanja diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Evaluasi Renja (realisasi belanja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
BELANJA :				
Belanja Pegawai	9.093.723.201	8.366.711.714	727.011.487	92,01
Belanja Barang Dan Jasa	25.656.007.663	24.993.196.968	662.810.695	97,42
Belanja Modal	5.699.079.775	5.317.922.005	381.157.770	93,31
JUMLAH BELANJA	40.448.810.639	38.677.830.687	1.770.979.952	95,62

Berdasarkan tabel diatas secara umum menunjukkan bahwa capaian serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup cukup tinggi yaitu berada pada kisaran 95,62%. Berdasarkan rincian jenis belanja secara berurutan dari yang tertinggi capaian serapannya adalah belanja barang dan jasa (97,42%), belanja modal (93,31%) dan yang terakhir belanja pegawai (92,01%).

Belanja barang dan jasa serta belanja modal berisikan jenis belanja yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan pelayanan urusan lingkungan hidup yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Belanja modal serapannya masih hanya 93,31% disebabkan karena adanya efisiensi anggaran melalui proses pengadaan barang dan jasa melalui proses tender, pengadaan langsung dan e-catalog. Belanja pegawai memiliki realisasi yang paling rendah, hal ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya karena anggaran belanja pegawai sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sedangkan belanjanya diatur oleh Peraturan Pemerintah yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Belanja barang dan jasa serta belanja modal yang tidak bisa mencapai 98%-99% juga disebabkan karena masih kurang cermatnya perencanaan dan penganggaran, dimana proses perencanaan dan penganggaran pada T-1 belum secara detail disusun, sehingga pada saat tahun berjalan atau tahun 2023, masih membutuhkan waktu untuk pendetailan kelengkapan proses pengadaan seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Aksi untuk pendetailan jadwal dan lain-lainnya. Perencanaan yang kurang detail juga akan berimbas pada proses monitoring dan evaluasi yang kurang optimal.

Realisasi belanja juga disampaikan berdasarkan sumber anggarannya. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan tahun 2023 berasal dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK fisik) dengan rincian seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Evaluasi Renja (anggaran) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/LEBIH	%
DANA :				
DAU	35.789.935.639	34.348.296.487	1.441.639.152	95,97
DAK	4.658.875.000	4.329.534.200	329.340.800	92,93
DBHCHT				
Jumlah Belanja	40.448.810.639	38.677.830.687	1.770.979.952	95,62

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DAU (95,97%) lebih tinggi dari relaisasi penyerapan anggaran dengan sumber dana DAK (92,93%). Perbedaan realisasi serapan anggaran ini disebabkan karena jenis belanja yang bersumber dari DAK adalah jenis belanja modal dimana proses pengadaannya menyebabkan adanya efisiensi anggaran.

Anggaran DAU terserap hanya 95,97% disebabkan adanya sisa pada jenis belanja pegawai.

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DLH yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategi (Perubahan Renstra) DLH Tahun 2018-2023.

Kinerja DLH diuraikan melalui tujuan yaitu “meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan dua sasaran yaitu “meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” dan “meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sasaran “meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” memiliki 4 (empat) indikator dan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah” memiliki 1 (satu) indikator seperti dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam renja 20223 mendukung sasaran PRPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023 melalui 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator tahun 2023 semuanya tercapai kinerjanya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,50 poin	65,47	104,75
	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup			
	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	53,59 poin	56,98	106,33
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	81,04 poin	83,46	102,99
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,53 poin	46,76	107,42
	4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	45,50 poin	47,30	103,96
	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	1. Nilai SAKIP DLH	82,00 poin	82,80	100,98

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan maupun sasaran capaiannya diatas target yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 65,47 poin memiliki status **SEDANG**, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 18 (depalan belas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 56,98 poin memiliki status **SEDANG**, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 94 (sembilan puluh empat) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 14 (empat belas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 83,46 poin memiliki status **BAIK**, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 25 (dua puluh lima) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 46,76 poin memiliki status **KURANG**, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 265 (dua ratus enam puluh lima) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 18 (delapan belas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 47,30 poin yaitu berada pada rata-rata nilai Kota Kecil.

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu 82,80 poin yaitu masuk dalam kategori **MEMUASKAN**.

Analisa secara terperinci terkait capaian indikator kinerja diatas akan dibahas pada sub bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2. Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 11 program, 19 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Capaian kinerja tahun 2023 evaluasinya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan perangkat daerah	12.609.052.706	11.717.382.038	92,93%	100,00%	100,00%	100,00%
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	260.673.100	247.768.044	95,05%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.275.000	140.150.400	99,91%	3	3	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.238.000	12.462.690	81,79%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.589.000	9.711.520	91,71%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	13.555.000	13.353.671	98,51%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8.575.700	6.728.040	78,45%	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.920.400	6.472.580	65,25%	4	4	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.520.000	58.889.143	94,19%	3	3	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	10.060.346.656	9.319.981.674	92,64%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.908.593.200	8.184.471.714	91,87%	83	83	100,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.107.368.156	1.091.305.340	98,55%	13	13	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.071.700	9.042.800	99,68%	1	1	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.313.600	35.161.820	99,57%	18	18	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12.297.000	11.651.595	94,75%	2	2	100,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000	11.651.595	94,75%	2	2	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	33.000.000	29.000.000	87,88%	100,00%	100,00%	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33.000.000	29.000.000	87,88%	3	3	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen administrasi umum	982.857.670	960.329.320	97,71%	100,00%	100,00%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	478.061.985	473.261.000	99,00%	24	24	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.096.185	59.811.500	99,53%	44	44	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	66.919.500	66.618.500	99,55%	12	12	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.172.000	6.237.000	26,92%	12	9	75,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.608.000	354.401.320	99,94%	12	12	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan rekonsiliasi pengadaan barang milik daerah	105.431.000	104.880.000	99,48%	4	4	100,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	105.431.000	104.880.000	99,48%	1	1	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan dokumen laporan pelayanan publik SKPD	347.754.580	301.375.722	86,66%	1	1	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	282.053.180	250.427.102	88,79%	48	48	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65.701.400	50.948.620	77,55%	12	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen laporan pemeliharaan BMD	806.692.700	742.395.683	92,03%	1	1	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	503.811.200	441.258.068	87,58%	6	6	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.851.500	33.300.000	98,37%	5	5	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	199.980.000	199.418.475	99,72%	1	1	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69.050.000	68.419.140	99,09%	1	1	100,00%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	1.117.423.900	1.003.147.582	89,77%	80%	80%	100,00%
	Persentase usaha dan/kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan					76%	100,00%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi	220.906.300	207.904.894	94,11%	60%	60%	100,00%
Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	220.906.300	207.904.894	94,11%	3	7	233,33%
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi	896.517.600	795.242.688	88,70%	4	4	100,00%
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang di susun	762.119.500	663.275.528	87,03%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	134.398.100	131.967.160	98,19%	4	4	100,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sungai yang tidak tercemar	2.088.066.880	1.972.571.214	94,47%	30%	30%	100,00%
	Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar					95%	118,75%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persenate penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten					25%	100,00%
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi	1.412.422.180	1.330.618.856	94,21%	9,24%	9,24%	100,00%
	Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi				2,41%	2,41%	100,00%
	Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab.Pasuruan				3,46%	3,46%	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	300.884.600	296.887.128	98,67%	119	115	96,64%
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	94.294.800	90.959.623	96,46%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1.017.242.780	942.772.105	92,68%	1200	1084	90,33%
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Pemantuan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air	360.865.700	339.193.138	93,99%	30,00%	30,00%	100,00%
	Persentase pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan				25%	29,14%	116,56%
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	360.865.700	339.193.138	93,99%	20	30	150,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase Koordinasi Pemulihan kualitas sungai yang tercemar	314.779.000	302.759.220	96,18%	35,00%	35,00%	100,00%
	Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi kritis				30,00%	30,00%	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	314.779.000	302.759.220	96,18%	20	28	140,00%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	3.657.543.553	3.573.865.758	97,71%	0,055%	0,055%	100,00%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	3.657.543.553	3.573.865.758	97,71%	6,366%	6,366%	100,00%
Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang Disusun	192.441.300	183.722.291	95,47%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3.465.102.253	3.390.143.467	97,84%	11,22	12,2	108,73%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis di wilayah Kabupaten Pasuruan	427.683.350	408.926.275	95,61%	100,00%	100,00%	100,00%
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	271.670.950	268.604.380	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	233.253.300	230.462.765	98,80%	45	60	133,33%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	38.417.650	38.141.615	99,28%	45	57	126,67%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Fasilitasi pengumpulan Limbah B3 di wilayah Kabupaten Pasuruan	156.012.400	140.321.895	89,94%	100,00%	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	156.012.400	140.321.895	89,94%	1	4	400,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	667.177.000	591.343.553	88,63%	50,00%	50,00%	100,00%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	667.177.000	591.343.553	88,63%	22,00%	22,00%	100,00%
Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	379.455.000	346.382.613	91,28%	45	41	91,11%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD dan tenaga pengawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	18.011.100	14.670.081	81,45%	7	6	85,71%
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yg Izin LH, Izin PPLH yg diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	253.566.300	218.706.546	86,25%	14	15	107,14%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	16.144.600	11.584.313	71,75%	8	9	112,50%
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL dan HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	25.937.500	17.138.382	66,08%	1	1	100,00%
Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui	25.937.500	17.138.382	66,08%	1	1	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	25.937.500	17.138.382	66,08%	8	8	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	378.592.800	352.191.261	93,03%	19,00%	19,00%	100,00%
	Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan					25,00%	100,00%
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	378.592.800	352.191.261	93,03%	19,00%	19,00%	100,00%
	Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan				25,00%	25,00%	100,00%
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	378.592.800	352.191.261	93,03%	25	25	100,00%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten	76.692.600	67.462.820	87,97%	25,00%	25,00%	100,00%
	Persentase Sekolah/Madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)				25,00%	25,00%	100,00%
Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten	76.692.600	67.462.820	87,97%	35	35	100,00%
	Sekolah/madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)				7	7	100,00%
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	76.692.600	67.462.820	87,97%	42	42	100,00%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	121.760.200	111.794.836	91,82%	100,00%	100,00%	100,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan yang diselesaikan	121.760.200	111.794.836	91,82%	100,00%	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	77.134.660	69.076.749	89,55%	12	18	150,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan /atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	44.625.540	42.718.087	95,73%	7	11	157,14%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	19.278.880.150	18.862.006.968	97,84%	100,00%	90,00%	90,00%
	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA					97,00%	97,00%
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	19.278.880.150	18.862.006.968	97,84%	27,00%	25,00%	92,59%
	Persentase penanganan sampah				72%	70,00%	97,22%
Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1.800.000	1.764.720	98,04%	2	2	100,00%
Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1.377.672.500	1.242.363.016	90,18%	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA	17.010.602.550	16.762.798.350	98,54%	197.157	191.242	97,00%

Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	370.742.600	345.060.960	93,07%	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	149.481.600	144.849.022	96,90%	3	3	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	368.580.900	365.170.900	99,07%	3	3	100,00%
	JUMLAH	40.448.810.639	38.677.830.687	95,62%			

Berdasarkan tabel 2.5 tentang realisasi capaian kinerja dan anggaran tahun 2023 diatas yaitu untuk tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menjalankan 11 Program, 22 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan.

Program dengan tingkat kinerja realisasi anggaran terbaik yaitu program pengelolaan persampahan yaitu 97,84% dan program dengan realisasi kinerja terburuk atau realisasinya paling kecil yaitu 66,08% yaitu program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Program pengelolaan persampahan adalah salah satu dari program prioritas di DLH, dimana anggarannya dipergunakan untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasuruan seperti pengelolaan TPA Wonokerto, pengangkutan residu sampah dari TPS ke TPA, pengadaan sarana prasarana persampahan, gaji tenaga penyapuan dan sopir pengangkutan sampah, sosialisasi pengelolaan sampah dari sumbernya dan banyak hal lain. Anggaran persampahan yang ada sebetulnya belum mencukupi kebutuhan pengelolaan sampah dengan cakupan satu Kabupaten, pengelolaan sampah dibantu dengan CSR perusahaan. Anggaran tidak terserap 100% karena proses efisiensi anggaran pada proses tender, sehingga dapat disimpulkan kinerja penyerapan anggaran sudah optimal.

Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH adalah program yang baru dibuka tahun 2023 dengan sasaran khusus pada masyarakat adat Tengger. Adapun penyerapat tidak maksimal dikarenakan petunjuk teknis belum tentang pembinaan MHA masih belum ada, sehingga hanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan saja yang dilakukan.

Evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diuraikan berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DLH yang tertuang pada Peraturan Bupati Pasuruan nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi (Renstra) DLH Tahun 2024-2026.

Kinerja DLH diuraikan melalui tujuan yaitu “Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;” dengan indikator Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan dua sasaran yaitu “Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” dan “meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sasaran “Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup” memiliki 4 (empat) indikator dan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah” memiliki 1 (satu) indikator.

Hasil evaluasi Renja (kinerja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Tribulan I dan II adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam renja melalui 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator tahun 2024 semuanya tercapai kinerjanya, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Realisasi Kinerja Tahun 2024 Tribulan I dan II

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI		Capaian	
			Tribulan I	Tribulan II	Tribulan I	Tribulan II
	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup					
1.	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1,11%	-	-	-	-
	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup					
1.	Persentase Upaya Penaatan Lingkungan Hidup	12,50%	12,50%	-	100%	-
2.	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	52,17%	55,6%	78,1%	106,5%	149,7%
3.	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	55%	-	43,61%	-	79,3%
4.	Persentase Ketaatan Penanggungjawab	46,67%	80%	60%	172%	128,5%

NO	TUJUAN / SASARAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI		Capaian	
			Tribulan I	Tribulan II	Tribulan I	Tribulan II
	Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah					
	Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
5.	Nilai SAKIP DLH	85 poin	-	83,20	-	97,88%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan maupun sasaran capaiannya diatas target yang ditetapkan.

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tujuan pada triwulan I dan II yaitu indikator tujuan **Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup** Realisasi capaian sebagaimana Tujuan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sampai dengan Tribulan II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Tribulan I dan II) masih menunjukkan realisasi 0 (sesuai dengan target). Pada Tribulan ini masih dalam tahap pengujian yang nanti data yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas lingkungan ini selanjutnya pada akhir periode (tahun) akan menjadi dasar menghitung Persentase Penurunan Beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (IKLH dan IKPS). Nilai indeks masing-masing komponen tersebut akan diperoleh pada tribulan IV.
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan berdasarkan 4 (empat) Sasaran indikator adalah sebagai berikut :
 - a) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup** realisasi pada triwulan II sebesar 0% dikarenakan sudah terpenuhi di tribulan I dan untuk tribulan II untuk memonitoring dan mengevaluasi serta mempertahankan kinerja.
 - b) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB 3** realisasi pada triwulan I tercapai realisasi 55,6 % dan Triwulan II tercapai realisasi sebesar 78,1 %. Capaian kinerja Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB 3 realisasi pada triwulan I dan II berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan. Keberhasilan capaian ini sebagai gambaran pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Pasuruan. Target-target pada

sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Pada Triwulan II berdasarkan adanya pengaduan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup, setelah dilakukan klarifikasi dan pengumpulan data lapangan baik administrasi maupun fakta lapangan serta evaluasi penanganan pengaduan terkait pokok aduan dugaan pembuangan limbah B3 di Desa Bulusari Kecamatan Purwosari sehingga tidak terbukti adanya indikasi limbah B3.

- c) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** realisasi pada triwulan I masih belum dapat dilakukan perhitungan dikarenakan belum dilakukan pengujian kualitas lingkungan (air dan udara) dimana pengujian tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali atau pada triwulan II dan triwulan IV dan pada triwulan II tercapai realisasi sebesar 43,61%. Capaian kinerja **Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** realisasi pada triwulan II berhasil melampaui target tahunan yang ditetapkan. Target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - d) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator **Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah** pada Triwulan I realisasi sebesar 80% dan triwulan II tercapai realisasi sebesar 60%. Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Target-target pada sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
 - e) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator **Nilai SAKIP** pada triwulan I belum terdapat realisasi, untuk realisasi triwulan II tercapai realisasi 83,20.
2. Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya indikator sasaran diatas, dilakukan melalui pelaksanaan 11 program, 23 kegiatan dan 62 sub kegiatan. Capaian kinerja tahun 2024 evaluasinya sebagai berikut:

Tabel 2.7
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I dan II Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	11.344.594.311	2.596.494.681,00	3.253.945.011	22,9	29	100	95	98	95	98
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	76.392.400	14.961.250	11.274.566	19,58	14,76	100	25	25	25	25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.950.000	11.431.250	2.040.000	49,81	8,89	3	1	1	33,33333333	33,33333333
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.199.500	1.886.250	0	14,29	0	2	1		50	0
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.266.000	0	306.000	-	4,21	2	0	1	0	50
Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5.284.900	0	325.000	-	6,15	2	0	1	0	50
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.376.000	-		-	0	2	0		0	0
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.977.000	1.643.750	1.972.500	20,61	24,73	4	1	1	25	25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.339.000	0	6.631.066	-	38,24	3	0		0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	10.296.866.094	2.485.272.690	2.858.469.927	24,14	27,76	100	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.954.983.246	2.183.672.728	2.561.929.871	24,39	28,61	80	80	80	100	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.305.099.848	292.405.962	291.930.556	22,40	22,37	13	3	3	23,07692308	23,07692308
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.782.600	4.119.300	0	42,11	0	7	1	2	14,28571429	28,57142857
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.000.400	5.074.700	4.609.500	18,79	17,07	18	4	5	22,22222222	27,77777778
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	12.297.000	-	-	-	0	100			0	0
Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.297.000	-	0	-	0	2			0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	28.000.000	600.000	-	2,14	0	100	100	100	100	100
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dn Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000	600.000	-	2,14	0	2	1	4	50	200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	370.098.917	49.264.416	109.905.244	13,31	29,70	100	100	98	100	98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15.000.000	4.886.775	7.886.775	32,58	52,58	10	2	2	20	20
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29.635.000	-	14.638.000	-	49,39	8		4	0	50
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25.338.000	-	12.638.500	-	49,88	8		4	0	50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.961.224	-	10.599.000	-	96,70	8		4	0	50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.978.893	5.830.000	4.015.000	18,82	12,96	12	3	3	25	25
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	22.529.800	3.996.150	3.140.350	17,74	13,94	12	3	2	25	16,66666667
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.656.000	34.551.491	56.987.619	14,66	24,18	12	3	3	25	25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	43.548.000	-	39.475.000	-	90,65	100			0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34.070.000	-	30.125.000	-	88,42	16		8	0	50
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9.478.000	-	9.350.000	-	98,65	7			0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	101.100.000	13.186.275	29.821.724	13,04	29,50	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96.100.000	13.186.275	25.270.724	13,72	26,30	48	12	12	25	25
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.000.000	-	4.551.000	-	91,02	3			0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	416.291.900	33.210.050	204.998.550	7,98	49,24	100	50		50	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	252.471.000	20.710.050	104.599.550	8,20	41,43	210	45	53	21,42857143	25,23809524
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.880.900	7.500.000	0	95,17	0	20	20		100	0
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11.300.000	-	2.250.000	-	19,91	70		20	0	28,57142857
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126.720.000	-	98.149.000	-	77,45	2		1	0	50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor Dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17.920.000	5.000.000	0	27,90	0	5	2		40	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	391.528.600	16.819.791	34.936.600	4,29	9	44,44	14	-	31,50315032	0
Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	226.202.600	9.929.791	18.397.600	4,39	8,13	59,32	-	61,66	0	103,9447067
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab / Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	204.228.000	6.409.791	11.930.000	3,14	5,84	2	1	1	50	50
Penyusunan Dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	21.974.600	3.520.000	6.467.600	16,02	29,43	2	2	1	100	50
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	165.326.000	6.890.000	16.539.000	4,17	10	20	-	-	0	0
Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	165.326.000	6.890.000	16.539.000	4,17	10	1	1	1	100	100
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	2.638.535.230	232.378.507	161.641.320	9	6	55	-	48,44	0	88,07272727
	Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis						40	20	6,67	50	16,675
Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	2.322.725.230	90.037.407	128.228.342	3,88	5,52	100	-	50	0	50
	persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan						40	-	-	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.639.999.600	4.927.400	10.660.300	0,30	0,65	119	-	47	0	39,49579832
Koordinasi, Sinkronisasi Dan	Jumlah Dokumen Hasil	54.798.300	-	1.103.750	-	2,01	1	7	-	700	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan										
Pengelolaan Lab. Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	627.927.330	85.110.007	116.464.292	13,55	18,55	1204	252	491	20,93023256	40,7807309
Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	184.249.000	35.533.850	24.576.600	19,29	13,34	5	1,1	0,7	22	14
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	178.578.000	35.533.850	18.936.650	19,90	10,60	50	11	7	22	14
Penghentian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5.671.000	-	5.639.950	-	99,45	4		3	0	75
Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	131.561.000	106.807.250	8.836.378	81,18	6,72	23	16,67	12	72,47826087	52,17391304
Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	131.561.000	106.807.250	8.836.378	81,18	6,72	12	8	2	66,66666667	16,66666667
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	6.830.558.985	333.333.673	610.738.446	4,88	8,94	8,8	9,54	-	108,4090909	0
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	6.830.558.985	333.333.673	610.738.446	4,88	8,94	100	-	-	0	0
Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	188.004.300	-	0	-	0	1	-	-	0	0
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6.642.554.685	333.333.673	610.738.446	5,02	9,19	800	-	-	0	0
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Persentase pendampingan/pembinaan	259.791.333	17.649.808	77.170.150	6,79	30	33	-	-	0	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	/sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di wilayah kabupaten pasuruan										
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	126.389.333	10.346.900	70.530.850	8,19	55,80	100	46,67	26,67	46,67	26,67
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Limbah Sementara B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	88.798.000	6.121.400	60.438.000	6,89	68,06	30	14	10	46,66666667	33,33333333
Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	37.591.333	4.225.500	10.092.850	11,24	26,85	30	11	15	36,66666667	50
Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi pengumpulan Limbah B3 di wilayah Kabupaten	133.402.000	7.302.908	6.639.300	5,47	4,98	100	36,67	25	36,67	25
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.042.000	0	0	-	0	1	-	-	0	0
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Propinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan / Atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	131.360.000	7.302.908	6.639.300	5,56	5,05	3	-	2	0	66,66666667
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha	414.557.830	16.116.450	82.479.023	3,89	19,90	53	14	14	26,41509434	26,41509434

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah										
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	414.557.830	16.116.450	82.479.023	3,89	19,90	15,3	-	-	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan / Atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	78.304.040	5.153.500	54.814.309	6,58	70	45	2	10	4,444444444	22,22222222
Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	289.298.290	10.962.950	25.817.464	3,79	8,92	15	5	6	33,33333333	40
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	46.955.500	-	1.847.250	-	3,93	5	2	1	40	20
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	51.098.800	-		-	-	25	-	-	0	0
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	17.078.600	-	-	-	0	1	-	-	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, Dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kearifan Lokal Atau Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	17.078.600	-	0	-	0	8	-	-	0	0
Peningkatan Kapasitas MHA Dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	34.020.200	-	-	-	0	2			0	0
Pemberdayaan, Kemitraan,	Jumlah Dokumen	34.020.200	-	0	-	0	2			0	0

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Pendampingan, Dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan										
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Masyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100.000.000	6.137.500	5.161.750	6,14	5,16	5,16			0	0
Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	100.000.000	6.137.500	5.161.750	6,14	5,16	88	13		14,77272727	0
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100.000.000	6.137.500	5.161.750	6,14	5,16	4	1	1	25	25
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik Persentase Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) di wilayah kabupaten	70.000.000	-	11.700.000	-	16,71	2,8	-	-	0	0
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	70.000.000	-	11.700.000	-	16,71	4,58	-	-	0	0
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70.000.000	-	11.700.000	-	16,71	4	-	1	0	25
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui	124.368.100	4.350.000	21.889.350	3,50	17,60	100	100	100	100	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
	penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten										
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	124.368.100	4.350.000	21.889.350	3,50	17,60	100	100	100	100	100
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	87.834.200	3.563.000	20.016.150	4,06	22,79	15	3	4	20	26,66666667
Koordinasi, Sinkronisasi, Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan / Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	36.533.900	787.000	1.873.200	2,15	5,13	15	1	1	6,666666667	6,666666667
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	13.695.621.679	4.799.426.844	1.987.096.245	35	14,51	79,3	19,83	19,83	25,00630517	25,00630517
	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA						32,1	8,03	8,03	25,01557632	25,01557632
Pengelolaan Sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	13.695.621.679	4.799.426.844	1.987.096.245	35	14,51	22,2	-	-	0	0
	Persentase capaian penanganan sampah						22,8	-	-	0	0
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	110.000.000	67.330.000	38.150.000	61,21	34,68	33	9	8	27,27272727	24,24242424
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	39.433.400	-	12.870.000	-	32,64	1		1	0	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran					Kinerja				
		Target	Realisasi Trib I	Realisasi Trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II	Target	Realisasi Trib I	Realisasi trib II	Capaian Trib I	Capaian Trib II
Penyediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	300.573.000	1.950.000	49.550.000	0,65	16,49	8	1	-	12,5	0
Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	75.000.000	-	8.696.311	-	11,60	2	-	1	0	50
Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	5.445.944.000	3.338.308.890	0	61,30	0	38	20	5	52,63157895	13,15789474
Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodegester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.982.092.800	1.332.287.954	1.682.671.224	19,08	24,10	111466	27866	27867	24,99955143	25,00044857
Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang Dan Pemanfaatan Kembali	jumlah sampah yang terdaur ulang	516.146.479	59.550.000	119.536.010	11,54	23,16	100	25	25	25	25
Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA / TPST Kab / Kota Atau TPA / TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	226.432.000	-	75.622.700	-	33,40	8591	2147	2148	24,99126993	25,00291002
		35.920.654.868	8.353.408.518	6.246.757.895	23,26%	17,39%					

Berdasarkan data yang termuat pada tabel 2.7 tentang realisasi capaian kinerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 untuk triwulan I dan II diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan, Program Pengelolaan Persampahan memiliki performa yang baik dalam penyerapan anggaran yaitu pada triwulan I mencapai 35% dan triwulan II 14,51%, sehingga total 50%, sedangkan program yang kinerjanya paling rendah dalam penyerapan anggaran yaitu Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih 0%.

Penyerapan anggaran memiliki beberapa tahapan proses yang memerlukan kecermatan dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya, kondisi diatas akan menjadi evaluasi dan penyusunan strategi untuk mengoptimalkan serapan anggaran pada DLH dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintah bidang lingkungan hidup.

Pada performa realisasi kinerja untuk program dengan capaian kinerja yang paling tinggi yaitu Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu realisasi triwulan I dan II 100%, sedangkan Program dengan performa kinerja terburuk adalah Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih 0%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup memiliki indikator dengan perhitungan atau formulasi tindaklanjut penanganan pengaduan melalui penerapan sanksi administrative dibagi pengaduan yang ditindaklanjuti, dimana tekanan social cukup tinggi, sehingga target akan diupayakan bagaimanapun terealisasi, yaitu tindak lanjut dari pengaduan yang ditindaklanjuti. Kinerja dari program MHA perlu dievaluasi dan dibicarakan bersama untuk pencapaian target kinerjanya.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pencapaian Renstra s/d tahun berjalan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)		
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
	Urusan Wajib												
(diisi)	Bidang Lingkungan Hidup												
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67	%					44,44	%	44,44	%	66,66
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	66,10	%					59,32	%	59,32	%	89,74
2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	7	dokumen									0,00
2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan											0,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH kabupaten/Kota	2	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	100,00
2.11.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah MengakomodirRPPLH Kabupaten/Kota	3	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	66,67
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	55,56	%					20	%	20	%	36,00
2.11.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4	dokumen									0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)		
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.02.2.02.02	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	dokumen					1	dokumen	1	dokumen	50,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	65	%					55	%	55	%	84,62
		Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	60	%					40	%	40	%	66,67
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan	100	%					100	%	100	%	100,00
		Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	100	%					40	%	40	%	40,00
2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	119	dokumen					119	dokumen	119	dokumen	100,00
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11	dokumen					1	dokumen	1	dokumen	9,09
2.11.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1254	dokumen									0,00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1254	dokumen					1204	dokumen	1204	dokumen	96,01
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	7	%					5	%	5	%	71,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)		
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	180	laporan					50	laporan	50	laporan	27,78
2.11.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	12	titik					4	titik	4	titik	33,33
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	35	%					23	%	23	%	65,71
2.11.03.2.03.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	5	dokumen									0,00
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	-	kegiatan									0,00
2.11.03.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	5	dokumen									0,00
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-	kegiatan									0,00
2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	42	dokumen									0,00
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	42	kegiatan					12	kegiatan	12	kegiatan	28,57
2.11.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	5	dokumen									0,00
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-	kegiatan									0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.11.04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)	9,9	%					8,8	%	8,8	%	88,89
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	22,22	%					12,5	%	12,5	%	56,26
2.11.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	3	dokumen					1	dokumen	1	dokumen	33,33
2.11.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15	ha									0,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1	unit									0,00
2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6439	ha					800	ha	800	ha	12,42
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Presentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	100	%					33	%	33	%	33,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100	%					100	%	100	%	100,00
2.11.05.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	120	dokumen					30	dokumen	30	dokumen	25,00
2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	120	laporan					30	laporan	30	laporan	25,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100	%					100	%	100	%	100,00
2.11.05.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3	dokumen					1	dokumen	1	dokumen	33,33
2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	12	dokumen					3	dokumen	3	dokumen	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	40	%					53	%	53	%	132,50
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	17,52	%					15,3	%	15,3	%	87,33
2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	135	dokumen					45	dokumen	45	dokumen	33,33
2.11.06.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	17	orang									0,00
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	17	orang					5	orang	5	orang	29,41
2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46	laporan									0,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	46	badan usaha					15	badan usaha	15	badan usaha	32,61
2.11.06.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHd	46	dokumen									0,00
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	42	%					25	%	25	%	59,52
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	jumlah mHA yg diakui	3	lembaga					1	lembaga	1	lembaga	33,33
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12	dokumen					8	dokumen	8	dokumen	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.11.07.202	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	4	lembaga					2	lembaga	2	lembaga	50,00
2.11.07.202.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	9	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	22,22
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	9,94	%					5,16	%	5,16	%	51,91
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	103	lembaga					88	lembaga	88	lembaga	85,44
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12	dokumen					4	dokumen	4	dokumen	33,33
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	3,4	%					2,8	%	2,8	%	82,35
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5,28	%					4,58	%	4,58	%	86,74
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	12	entitas					4	entitas	4	entitas	33,33
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100	%					100	%	100	%	100,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Jumlah penanganan pengaduan masyarakat dibidang PPLH kab yang diselesaikan	3,4	%					100	%	100	%	2941,18
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanganii	45	dokumen									0,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanganii	45	pengaduan					15	pengaduan	15	pengaduan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	42	dokumen									0,00
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	42	perkara					15	perkara	15	perkara	35,71
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	54,9	%					32,1	%	32,1	%	58,47
		Persentase capaian pengurangan sampah	82	%					79,3	%	79,3	%	96,71
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	38,4	%					22,8	%	22,8	%	59,38
		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	24,6	%					22,2	%	22,2	%	90,24
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3	laporan									0,00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		ton					100	ton		ton	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	396,972	ton									0,00
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		unit					38	unit		unit	0,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		ton					111466	ton		ton	0,00
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		ton					8591	ton		ton	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)			
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	99	kelompok					33	kelompok	33	kelompok	33,33
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3	dokumen					1	dokumen	1	dokumen	33,33
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	54	unit					8	unit	8	unit	14,81
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok	100	%					100	%	100	%	100,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok	100	%					100	%	100	%	100,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	22,22
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen					3	dokumen	3	dokumen	50,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen					2	dokumen	2	dokumen	33,33
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	laporan					4	laporan	4	laporan	33,33
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	laporan					3	laporan	3	laporan	33,33
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100	%					100	%	100	%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)		
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	org/bln					80 org/bulan	80 org/bulan		100,00
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108	dokumen					13 dokumen	13 dokumen		12,04
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18	dokumen					7 dokumen	7 dokumen		38,89
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57	laporan					18 laporan	18 laporan		31,58
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	dokumen					2 dokumen	2 dokumen		33,33
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	dokumen					2 dokumen	2 dokumen		10,00
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	21	dokumen								0,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	orang					16 orang	16 orang		26,67
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355	unit								0,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	paket					10 paket	10 paket		20,83
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	paket					8 paket	8 paket		44,44
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	paket					8 paket	8 paket		33,33
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27	paket					8 paket	8 paket		29,63
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket					12 paket	12 paket		100,00
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	paket								0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2024))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2024)		
						Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	laporan					12 laporan	12 laporan		33,33
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	laporan					12 laporan	12 laporan		33,33
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	unit								0,00
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	unit								0,00
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	unit					16 unit	16 unit		53,33
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	unit								0,00
2.11.01.2.07.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54	unit					7 unit	7 unit		12,96
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	laporan					48 laporan	48 laporan		33,33
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	laporan					3 laporan	3 laporan		20,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100	%					100 %	100 %		100,00
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	unit					210 unit	210 unit		3500,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	36	unit					20 unit	20 unit		55,56
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	unit					70 unit	70 unit		291,67
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit					2 unit	2 unit		33,33
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit					5 unit	5 unit		83,33

Tabel 2.8.A				
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024				
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	66,66	100,00	Pelaksanaan banyak bergantung pada agenda dari pusat dan pihak eksternal	Dilakukan sesuai agenda dari pusat dan pihak eksternal
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	89,74	100,00	Rapat koordinasi penyusunan dokumen IKPLHD elum dapat dilaksanakan karena pedoman penyusunan dari KLHK belum diterbitkan	Tetap dilakukan di Tribulan selanjutnya
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	100,00	100,00	Dokumen yang dihasilkan (Lap IKLH) sudah sesuai dengan perencanaannya (SOP)	Disesuaikan dengan jadwal perencanaannya
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	33,33	100,00		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	54,00	100,00	Pelaksanaan pembekalan tim KLHS tertunda karena diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait sinkronisasi time line dan jenis penyusunan KLHS (provinsi dan kabupaten)	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	100,00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	50,00	100,00	Pelaksanaan pembekalan tim KLHS tertunda karena diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait sinkronisasi time line dan jenis penyusunan KLHS (provinsi dan kabupaten)	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	84,62	100,00	Kurang cermatnya dalam distribusi anggaran dimana kinerja yang harusnya direncanakan di tribulan III tapi dianggarkan di tribulan II	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
	66,67	100,00	Kurang cermatnya dalam distribusi anggaran dimana kinerja yang harusnya direncanakan di tribulan III tapi dianggarkan di tribulan II	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
	40,00	100,00		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100,00	100,00	Onlimo masih dalam tahap kontruksi di tribulan II terkendala diproses pengadaan yang mana proses pengadaan baru selesai di tribulan II	Dilaksanakan ditribulan III
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	18,18	100,00		
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	96,01	100,00	Perusahaan/ industri cenderung memakai jasa Lab yang sudah teregistrasi di KLHK	Laboratoium dalam proses pengajuan registrasi ke KLHK, bulan September akan dilaksanakan survailen ke 2 (oleh KAN) sekaligus perluasan ruang lingkup laboratorium lingkungan (outputnya surat rekomendasi dari KAN untuk registrasi ke KLHK)
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71,43	100,00	Pada tribulan II banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	27,78	100,00	Pada tribulan II banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	33,33	100,00	Pada tribulan II banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang muncul dan dapat terselesaikan dengan baik terkait kasusnya	Akan dilakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan sosialisasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65,71	100,00	Target anggaran tidak tercapai karena terdapat kegiatan sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan	Direncanakan akan dilaksanakan pada tribulan III atau IV dimusim tanam akhir tahun
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	20,00	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	75,00	100,00	Target anggaran tidak tercapai karena terdapat kegiatan sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan	Direncanakan akan dilaksanakan pada tribulan III atau IV dimusim tanam akhir tahun
Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	2,38	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	20,00	100,00		
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	88,89	100,00	Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya	Akan di GU kan dibulan berikutnya
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	56,26	100,00	Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya	Akan di GU kan dibulan berikutnya
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	33,33	100,00	Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya	Akan di GU kan dibulan berikutnya
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	0,00	100,00		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	13,67	100,00	Realisasi sudah tapi SP2D belum disahkan sehingga masuk bulan berikutnya	Akan di GU kan dibulan berikutnya
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	33,00	100,00		
Penyimpanan Sementara Limbah B3	100,00	100,00		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	33,33	100,00	Realisasi Kinerja melebihi target karena Sub Kegiatan ini melingkupi pelayanan publik, maka permohonan fasilitasi izin penyimpanan sementara LB3 yang masuk harus segera ditindaklanjuti	perlu kecermatan dalam penyampaian mekanisme pertanggungjawaban kegiatan di Sub Bagian keuangan, supaya LRA sesuai dengan target penyerapan anggarannya
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25,00	100,00	Realisasi Kinerja melebihi target karena Sub Kegiatan ini melingkupi verifikasi lapangan sesuai dengan permohonan fasilitasi izin penyimpanan sementara LB3 yang masuk dan harus segera ditindaklanjuti	perlu kecermatan dalam penyampaian mekanisme pertanggungjawaban kegiatan di Sub Bagian keuangan, supaya LRA sesuai dengan target penyerapan anggarannya
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	33,33	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25,00	100,00	Realisasi kinerja sesuai denga target karena kebutuhan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	132,50	100,00	Realisasi anggarannya tidak tercapai karena ada penyerapan yang akan dilakukan di tribulan III	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87,33	100,00	Realisasi anggarannya tidak tercapai karena ada penyerapan yang akan dilakukan di tribulan III	Dilaksanakan ditribulan selanjutnya

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	33,33	100,00	Permohonan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan diajukan pelaku usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan/penilaian substansi untuk penerbitan persetujuan lingkungan	Melakukan Bimtek sesuai arahan KLHK untuk melakukan pemrosesan/penilaian melalui Amdalnet
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	29,41	100,00		
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah	32,61	100,00		
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan	59,52	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	33,33	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	66,67	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	50,00	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA	22,22	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56,44	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	85,44	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	33,33	100,00	Dilakukan Ditribulan III	Dilakukan sesuai jadwal
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	82,35	100,00	kurangnya koordinasi dengan stakeholder	Akan dikomunikasikan dengan stakeholder lebih lanjut
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,74	100,00	kurangnya koordinasi dengan stakeholder	Akan dikomunikasikan dengan stakeholder lebih lanjut
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	33,33	100,00	kurangnya koordinasi dengan stakeholder	Akan dikomunikasikan dengan stakeholder lebih lanjut
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100,00	100,00		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100,00	100,00		
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	33,33	100,00	telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran, namun ada yg tidak sesuai perencanaan	pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan, namun adakanyanya tidak bisa memprediksi adanya pengaduan yang masuk, sehingga tindaklanjutnya sejalan dengan pengaduan yang masuk sehingga resikonya penyerapan anggaran tidak bisa berjalan dengan rencana anggaran kas
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	35,71	100,00	telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran, namun ada yg tidak sesuai perencanaan	pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan, namun adakanyanya tidak bisa memprediksi adanya pengaduan yang masuk, sehingga tindaklanjutnya sejalan dengan pengaduan yang masuk sehingga resikonya penyerapan anggaran tidak bisa berjalan dengan rencana anggaran kas
Program Pengelolaan Persampahan	0,58	100,00		
	0,97	100,00		
Pengelolaan Persampahan	0,59	100,00		
	0,90	100,00		

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2024	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0,33	100,00	Kegiatan sudah terlaksana , SPJ kegiatan 12.060.000 belum melaporkan	Mempercepat proses penyesuaian dokumen SPJ
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		100,00	Kegiatan terlaksana di Tribulan I, SPJ kegiatan baru melaporkan ditrib II karena kegiatan yang padat	Mempercepat proses penyesuaian dokumen SPJ
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		100,00	Dikarenakan terlambatnya pengiriman rekapitulasi dari pihak ke 3	Mempercepat proses penyusunan
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		100,00	Kegiatan terlaksana di Tribulan I, SPJ kegiatan baru melaporkan ditrib II karena kegiatan yang padat	Mempercepat proses penyesuaian dokumen SPJ
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		100,00	Belum terlaksana yang kontrak dikarenakan masih memerlukan kajian	Mempercepat proses kajian terhadap kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,33	100,00	Kegiatan terlaksana namun proses pelaporan dan penyerapan baru di trib III	Mempercepat terhadap kegiatan koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	0,33	100,00	Kegiatan terlaksana namun dikarenakan pekerjaan fisik baru closing dibulan ini	Mempercepat pemeriksaan terhadap pekerjaan dan proses pembayaran
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,33	100,00	Kegiatan terlaksana dan pengadaan baru seslesai di hulan ini	Mempercepat proses pencairan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program dan kegiatan, dengan beberapa capaian indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran ini diperoleh melalui indikator kinerja Nilai SAKIP, Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Masing-masing capaian kinerja indikator tersebut adalah:

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian Kerja	Target Akhir 2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	53,59 poin	56,98	106,33	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	81,04 poin	83,46	102,99	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	43,53 poin	46,76	107,42	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	45,50 poin	47,30	103,96	

1.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

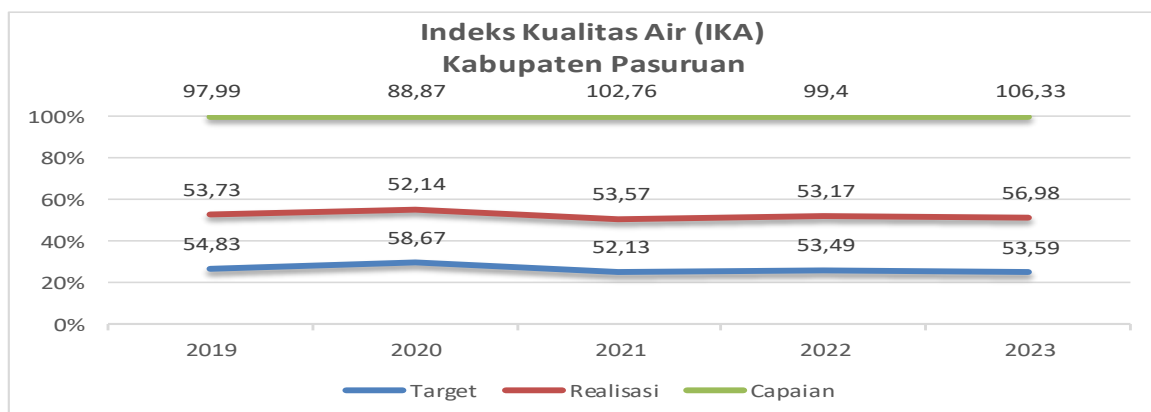
Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air sungai di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Peningkatan nilai IKA menunjukkan peningkatan kualitas air sungai dan sebaliknya. Penurunan kualitas air sungai pada umumnya terjadi akibat masuknya berbagai jenis limbah ke badan sungai, baik limbah padat maupun limbah cair yang dapat berasal dari kegiatan industri maupun domestik yang dipicu oleh kondisi sanitasi yang tidak layak. Selain itu, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam seperti peternakan, pertanian dan pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan di wilayah hulu juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan sedimentasi dan beban pencemaran yang masuk ke sungai. Potensi pencemaran air sungai cukup tinggi mengingat

banyaknya jumlah industri yang berinvestasi di Kabupaten Pasuruan. Saat ini tercatat sekitar 8.500 industri skala kecil, menengah dan besar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang berpotensi menambah beban pencemaran yang masuk ke air sungai. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk juga berimplikasi pada peningkatan timbulan air limbah domestik dari kegiatan perumahan/permukiman. Nilai IKA Kabupaten Pasuruan diperoleh dari data pemantauan air sungai pada tiga titik yang mewakili 9 (sembilan) DAS masing-masing di area hulu, tengah dan hilir yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sebaran titik pemantauan dan status mutu sungai dapat dilihat dalam peta sebagai berikut :



Gambar 3.1 Sebaran Titik Pemantauan dan Status Mutu Sungai Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Data tambahan sejumlah 9 (sembilan) titik diperoleh dari pemantauan air Sungai Welang-Rejoso oleh DLH Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, terdapat 63 titik pemantauan air sungai yang digunakan dalam perhitungan IKA tahun 2023.



Gambar 3.2 Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Pasuruan 2018-2023

Dari hasil perhitungan IKA dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023 yaitu 106,33% yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air adalah “Sangat Baik”. Target IKA tahun 2023 sebesar 53,59 pada grafik 3.2 tampak bahwa realisasi IKA tahun 2023 sebesar 56,98 yang menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2022. Angka realisasi IKA tahun 2023 melebihi dari target akhir renstra di tahun 2024 yaitu 53,59 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 106,33%. Capaian berhasil karena mencapai target capaian $\geq 100\%$, Angka realisasi nilai IKA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKA Nasional tahun 2023 sebesar 54,59 dan provinsi sebesar 55,86 menunjukkan bahwa IKA Kabupaten Pasuruan masih selalu di bawah nilai IKA Nasional dan Provinsi.

Nilai IKA Kabupaten Pasuruan sebesar 56,98 termasuk dalam kategori “sedang”. Nilai ini memberikan kontribusi sebesar 8,49% terhadap nilai IKLH di tingkat kabupaten/kota. Nilai IKA pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,81 poin dari capaian tahun 2022 yang berarti bahwa secara umum terjadi peningkatan kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Pasuruan.

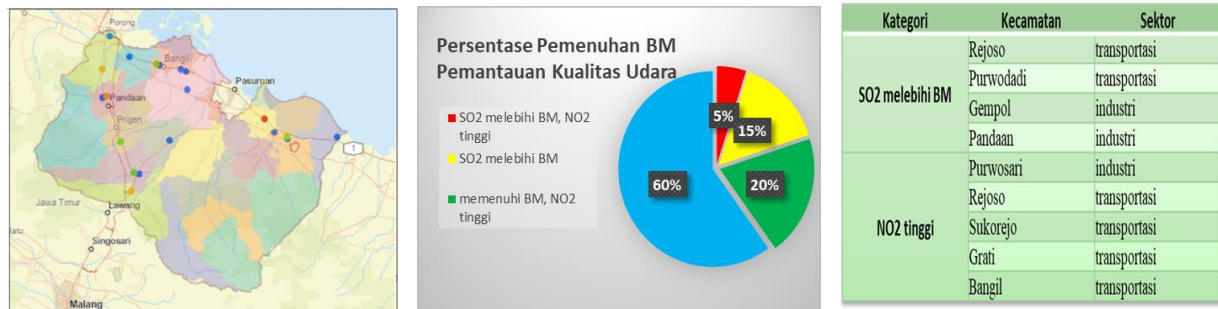
Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA diantaranya adalah

1. Peningkatan jumlah penduduk, ditambah dengan berkembangnya sektor usaha mikro/kecil di akhir masa pandemi yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pengolahan air limbah, berpotensi meningkatkan beban pencemaran air sungai. Air limbah domestik dari kegiatan perumahan/pemukiman yang tidak diolah memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan cemaran parameter *fecal coli*.;
2. Pendangkalan/sedimentasi sungai akibat dari pembukaan lahan di wilayah hulu yang menyebabkan peningkatan limpasan air hujan dan *eutrofikasi* yang meningkatkan akumulasi nutrisi seperti fosfat dan nitrat yang masuk ke aliran sungai.

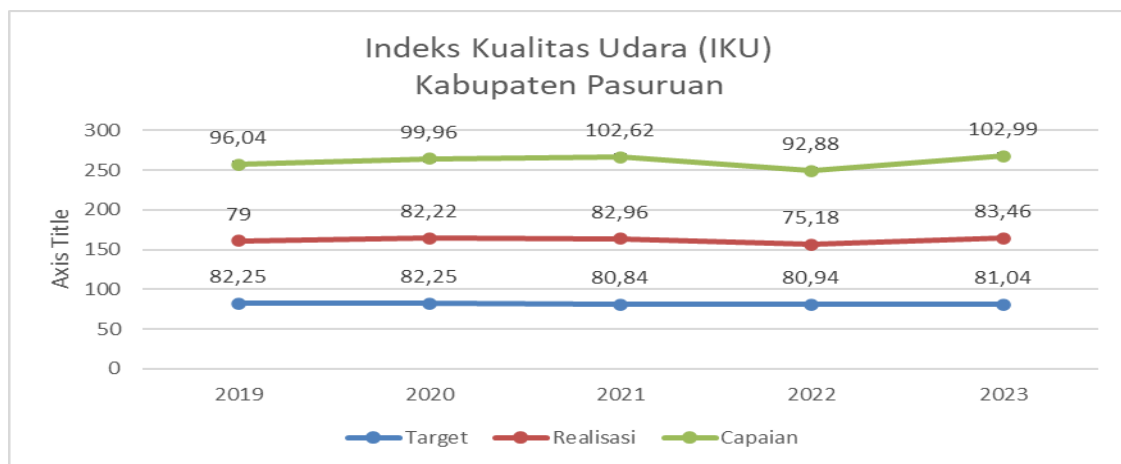
1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang umum dihadapi oleh wilayah perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Pasuruan. Sektor industri yang banyak berkembang di Kabupaten Pasuruan memberikan kontribusi terhadap peningkatan potensi pencemaran udara. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya. Indeks ini mampu menggambarkan kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Pasuruan, dimana sampel yang diuji telah mewakili kondisi daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama kota, kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung oleh transportasi.



Gambar 3.3 Sebaran titik pantau Indeks Kualitas Udara (IKU) 2023



Gambar 3.4 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Pasuruan 2019-2023

Dari hasil perhitungan IKU dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKU) Tahun 2023 yaitu 102.99% hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara adalah “sangat tinggi”. Target IKU tahun 2023 sebesar 81.04 dan terealisasi sebesar 83,46.

Target IKU Nasional tahun 2023 sebesar 84,40 dan target IKU Provinsi Jawa Timur sebesar 84,73 dari kedua target tersebut, realisasi nilai IKU Kabupaten Pasuruan tahun 2023 masih dibawah target nasional maupun provinsi. Angka realisasi nilai IKU Kabupaten Pasuruan tahun 2023 jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKU Nasional tahun 2023 sebesar 88,67 dan provinsi sebesar 84,73 menunjukkan bahwa IKU Kabupaten Pasuruan di tahun ini juga masih dibawah nilai IKU Nasional dan Provinsi.

Nilai IKU Kabupaten Pasuruan sebesar 83,43 termasuk dalam kategori “sangat baik” dan secara kumulatif memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Namun demikian, capaian nilai IKU pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,28 poin dibandingkan tahun 2022.

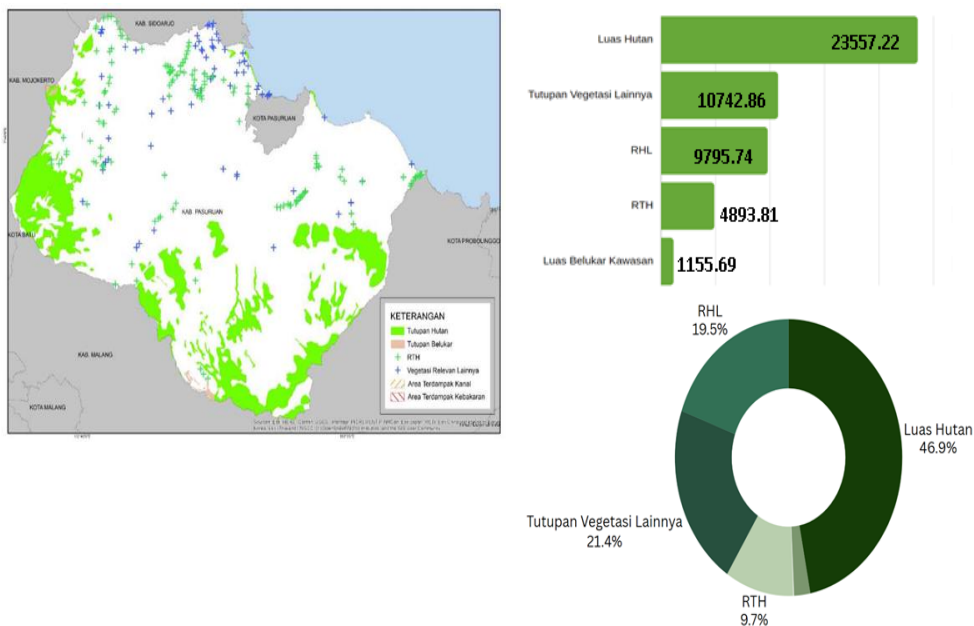
Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1. Aktivitas masyarakat dan mobilitas penduduk yang kembali tinggi di akhir masa pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalur-jalur transportasi;
2. Kegiatan industri yang telah beroperasi secara normal menyebabkan timbulan emisi cerobong dari pabrik dan mengakibatkan peningkatan beban pencemaran udara;
3. Terus berlangsungnya pembangunan fisik yang tidak diikuti dengan laju peningkatan ruang terbuka hijau yang seimbang menyebabkan penurunan kualitas udara di wilayah perkotaan.

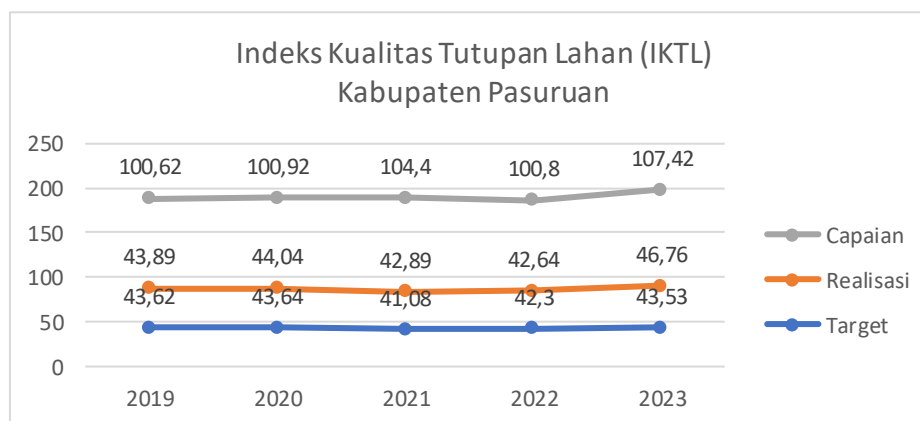
1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kualitas tutupan lahan (*land cover*) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait kerusakan hutan dan lahan yang mempengaruhi kualitas tutupan lahan, antara lain pertambangan liar dan penebangan hutan secara ilegal yang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta merusak sumber daya air yang berimbas kepada aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perubahan nilai IKTL dapat dipengaruhi oleh perubahan luasan kawasan hutan yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas pertambangan rakyat dan pemulihan lahan terkontaminasi B3. Nilai IKTL skala kabupaten/kota juga sangat dipengaruhi oleh ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan luas tutupan lahan.



Gambar 3.5 Sebaran titik pantau Tutupan Lahan tahun 2023



Gambar 3.6 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Pasuruan 2019-2023

Dari hasil perhitungan IKTL dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2023 yaitu 107.42% hasil tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah “sangat tinggi”. Target IKTL tahun 2023 sebesar 43.53. Pada grafik 3.3 mengenai nilai IKU di Kabupaten Pasuruan tampak bahwa realisasi IKTL tahun 2023 sebesar 46.76 yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2022, nilai tersebut sudah melebihi target akhir renstra di tahun 2023 yaitu 43,53. Hasil capaian IKTL Kabupaten Pasuruan terhadap target akhir Renstra 97,96%. Capaian tersebut dikatakan berhasil karna mampu melebihi target capaian $\geq 100\%$.

Target IKTL Nasional tahun 2023 sebesar 64,50 dan target IKTL Provinsi Jawa Timur sebesar 47,34 dari kedua target tersebut, realisasi nilai IKTL Kabupaten Pasuruan tahun 2023 masih dibawah target nasional maupun provinsi. Angka realisasi nilai IKTL Kabupaten

Pasuruan tahun 2023 jika dibandingkan dengan realiasi nilai IKTL Nasional tahun 2023 sebesar 61,79 dan Provinsi sebesar 49,70 menunjukkan bahwa IKTL Kota Pasuruan di tahun ini juga masih dibawah nilai IKU Nasional.

1.3 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)



Gambar 3.7 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Pasuruan 2019-2023

Perolehan nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) yaitu 46,00 poin, capaian persentase yaitu 101,10% dari nilai targetnya yaitu 45,50 poin. Nilai tersebut merupakan capaian dari program pengelolaan persampahan. Arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mencapai strategi tersebut adalah dengan Meningkatkan Persentase pengurangan sampah dan Meningkatkan Persentase penanganan sampah.

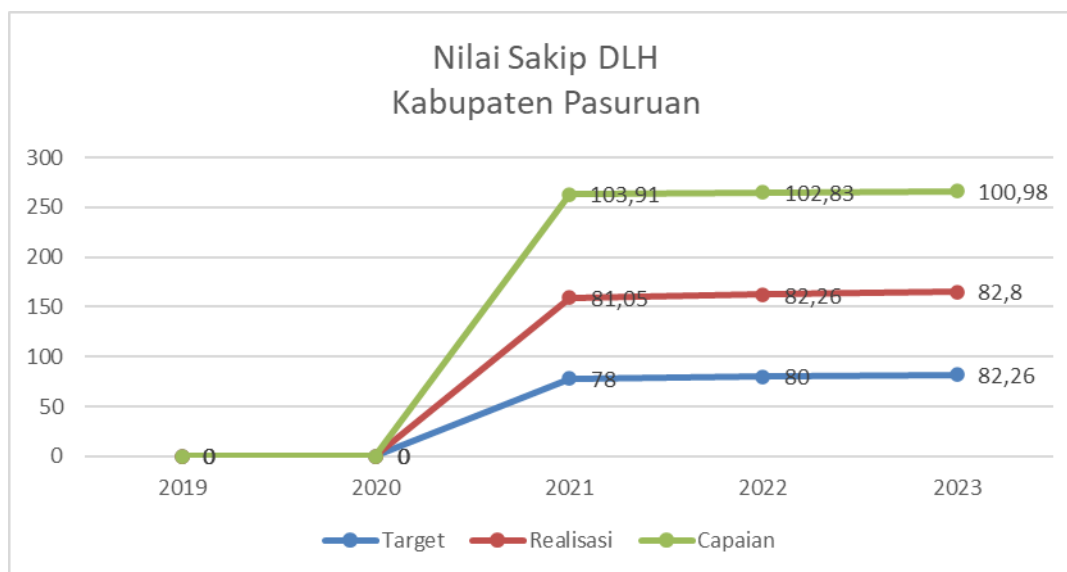
Selain Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki target sesuai jargon atau program unggulan Bapak Bupati yaitu SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah), dimana dalam pencapaian tahun 2023 memenuhi target yaitu terbentuk 40 Bank Sampah, sehingga total sampai tahun 2023 Kabupaten Pasuruan telah memiliki Bank Sampah Sejumlah 301 Bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Capaian kinerja pengelolaan berhasil melampaui target yang ditetapkan, selama periode tahun 2023 lokasi tempat-tempat umum, instansi serta komponen objek penilaian lainnya mampu mempertahankan pengelolaan lingkungannya. Keberhasilan capaian ini sebagai gambaran pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Pasuruan.

2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran meningkatnya meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperoleh melalui indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

Tahun 2023 melalui review Renstra DLH tahun 2018-2023 telah ditambahkan sasaran meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator nilai SAKIP, hal ini merupakan tindaklanjut dari Bimbingan Teknis SAKIP oleh Pemkab Pasuruan



Gambar 3.8 Nilai SAKIP DLH 2019-2023

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwasanya nilai target perolehan SAKIP terlampaui dengan perolehan 82,80. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut yaitu :

- Optimalisasi pemahaman terhadap penilaian SAKIP, hal ini dilakukan dengan rapat koordinasi/sosialisasi materi-materi perencanaan kepada seluruh komponen DLH setiap tribulan sekali sehingga dari kondisi yang sebelumnya belum familiar dengan perencanaan menjadi lebih mengenal dan memahami;
- Bekerjasamaantar komponen dalam Dinas Lingkungan Hidup;
- Memenuhi dokumentasi tiap-tiap tahapan perencanaan, implementasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta melengkapibukti dukungnya;
- Meningkatkan mutu dari dokumen kelengkapan SAKIP.

Capaian nilai IKA, IKU, IKTL, IKPS dan Nilai SAKIP yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup didapat dari beberapa program/kegiatan yang saling bersinergi, kegiatan menghasilkan output dan program menghasilkan outcome yang menunjang pencapaian nilai IKA, IKU dan IKTL baik secara

langsung maupun tidak langsung. Adapun program dan kegiatan yang menunjang untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Program/Kegiatan	Mendukung Capaian			Faktor L/TL	ANALISA KINERJA	REKOMENDASI PERBAIKAN
		IKA	IKU	IKTL			
1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
	1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√			L	Upaya pencegahan masih mengandalkan sosialisasi secara tatap muka	Memanfaatkan teknologi IT dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH
	2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√			L	Upaya penanggulangan pencemaran masih belum optimal	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi/pemberian informasi terkait penanggulangan pencemaran pada badan air
	3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	√			L	Masih belum optimal untuk pemulihan pencemaran di daerah hilir yang melibatkan banyak pihak yang diduga turut mencemari lingkungan	Meningkatkan koordinasi dengan stake holder Pemerintah maupun swasta untuk Bersama memulihkan lingkungan tercemar dan/atau rusak.
2	Perencanaan Lingkungan Hidup						
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		√		L	Masih belum optimal Analisa evaluasi lingkungan hidup	Upaya peningkatan kapasitas teknis SDM melalui konsultasi dan studi referensi ke DLH Provinsi dan kabupaten/kota lain serta mengikuti bimbingan teknis/workshop yang

No	Program/Kegiatan	Mendukung Capaian			Faktor L/TL	ANALISA KINERJA	REKOMENDASI PERBAIKAN
		IKA	IKU	IKTL			
							diadakan oleh provinsi dan kementerian
3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)						
	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			√	L	Masih focus pada pemeliharaan RTH yang ada, tidak ada inovasi dalam peningkatan luasan RTH perkotaan	Melibatkan seluruh stake holder dalam peningkatan luasan RTH yang akan berdampak pada peningkatan IKTL
4	Pengendalian B3 dan Limbah B3						
	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	√			TL	Masih hanya berfokus pada fasilitas pelayanan perizinan penyimpanan B3	Focus pada database limbah B3 dan terkoneksi secara spasial, sehingga memudahkan dalam monitoring B3 di Pasuruan
5	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH						
	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	√			L	Masih mengandalkan pengawasan langsung	Lakukan evaluasi ketaatan dengan komprehensif, lengkapi dengan pengawasan tidak langsung, serta perbaiki database kearah digitasi berbasis spasial
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						

No	Program/Kegiatan	Mendukung Capaian			Faktor L/TL	ANALISA KINERJA	REKOMENDASI PERBAIKAN
		IKA	IKU	IKTL			
	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		√		L	Masih berfokus pada sosialisasi secara tatap muka dan alat komunikasi yang sederhana	Perbaiki perencanaan untuk meningkatkan metode sosialisasi kepada masyarakat
7	Penghargaan Lingkungan Hidup						
	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	L	Masih berfokus pemberian penghargaan yang tidak ditindaklanjuti sesudahnya	Optimalisasi penerima penghargaan untuk terus berkontribusi kepada lingkungan, misalnya menjadi peer counselor untuk masyarakat lainnya.
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup						
	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	√	√	√	L	Pengaduan belum melibatkan masyarakat dalam jejaringnya	Optimalisasi untuk membentuk Tim lintas sector sehingga penanganan pengaduan lebih responsif

Indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS) didukung oleh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Berikut ini merupakan tabel program kegiatan yang mendukung terhadap keberhasilan capaian indikator.

No	Program/Kegiatan	ANALISA KINERJA	REKOMENDASI PERBAIKAN
1	Pengelolaan Persampahan		
	1. Pengelolaan Sampah;	Masih berfokus pada pengadaan/pembangunan sarana prasarana	1. Perlu dilakukan perencanaan yang lebih presisi dan akuntabel untuk semua sarana prasarana persampahan;

			2. Pembuatan SOP untuk seluruh proses pengelolaan persampahan.
--	--	--	--

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup				12,50%	12,50%				12,50%		
2	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3				52,17%	64,55%				64,55%		
3	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup				55%	60%				60%		
4	Persentase Upaya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup				46,67%	53,33%				53,33%		
5	Nilai Sakip DLH				85 poin	88 poin		82,80 poin		88 poin		
IKK OUTCOME												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan		V		62,504 poin	62,741 poin		65,47 poin				
a	Indeks Kualitas Air (IKA)		V		53,59 poin	53,62 poin		56,98 poin				
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)		V		81,04 poin	81,10 poin		83,46 poin				
c	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		V		43,53 poin	43,55 poin		46,76 poin				
2	Terlaksananya Pengelolaan Smapah di Wilayah Kabupaten		V		45%	54%		72,25%				
a	a. Tersedianya data dan informasi penananganan sampah diwilayah kabupaten/kota		V		10%	10%		22,08%				
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oelh pemerintah daerah kabupaten/kota		V		47%	53%		77,78%				
a	Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		V		100%	100%		100%				
b	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		V		13%	13%		5,88%				
c	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		V		67%	83%		0%				

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	Tahun n-2 (2023)	Tahun n-1 (2024)	Tahun n (2025)	Tahun n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
d	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		V		17%	25%		0%				
e	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		V		100%	100%		100%				
f	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya didaerah kabupaten/kota yang ditangani		V		100%	100%		100%				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima tahun kedepan adalah :

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah 1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483 m³/hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau $\pm 7,0\%$ dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain adalah sekitar 57 ton/hari atau $\pm 5\%$, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbernya sekitar 80 ton atau $\pm 7,0\%$ dan sisanya sebesar $\pm 81\%$ atau 924 ton/hari tidak dikelola.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, jumlah timbulan sampah selama tahun 2022 mencapai 188.466 m³ /hari atau 4.523.175 m³ /tahun. Jumlah timbulan sampah ini mengalami kenaikan sebesar 116% jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah pada tahun 2021 yang mencapai 2.097.377,24 m³ /tahun. Kapasitas pengolahan akhir sampah eksisting di TPA Wonokerto sebesar 218.948,15 m³ /hari, dengan sistem Control Landfill dengan luas area awal yang disediakan yaitu 4,587 ha.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 (satu) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan persampahan direncanakan pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4 lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompleks antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara dan bau serta penurunan kualitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah persampahan di Kabupaten Pasuruan.

2. Bencana Banjir

Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai.

Sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan yang berada di daerah pesisir merupakan daerah rawan banjir, yaitu meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejos, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Lekok. Kondisi dalam resiko bencana, yaitu kondisi bencana tanah longsor dan gempa bumi, korban serta kerugian yang terjadi di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022. Kasus bencana yang terjadi yaitu 44 kasus bencana tanah longsor dan 6 kasus bencana kekeringan, yang terjadi di Kecamatan Grati, Tosari, Tukur, Puspo, Purwodadi, Kejayan, Prigen, Lumbang, Pasrepan, dan Winongan.

Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di

tempat lain. Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 748 mm.

3. Perubahan atau alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun

Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya. Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun.

Berdasarkan data penggunaan lahan dapat diketahui luas total lahan yang tidak tertutup adalah mencapai 124.206,96 m² atau sekitar 83,33%. Lahan yang tidak tertutup bangunan, seperti hutan, kebun campuran, lahan kosong, perkebunan, sawah, semak belukar, taman kota dan tegalan/ ladang. Capaian nilai IKTL Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar 42,64 termasuk dalam kategori “kurang”. Nilai IKTL pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25 poin, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 42,89.

Gejala tersebut dapat mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya perlu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

4. Pencemaran Badan Air Permukaan

Potensi pencemaran air sungai di Kabupaten Pasuruan cukup tinggi mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Saat ini tercatat sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai. Nilai IKA diperoleh dari data pemantauan air sungai pada 9 (sembilan) DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbulan yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur Nilai IKA Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 sebesar 53,57, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKA mengalami penurunan hingga 53,17. Bobot IKA terhadap nilai IKLH di tingkat kabupaten/kota mencapai 37,6%

5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan metode *open dumping*, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, sehingga berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industri, perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020 adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu sendiri terhadap lingkungannya, padahal sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar karena keadaan lingkungan juga mempengaruhi kehidupan itu sendiri.

Berdasarkan uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan di atas, dirumuskan prioritas pembangunan dan proyek strategis urusan lingkungan hidup yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah.

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2023 adalah 1.634.022 Jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, maka menghasilkan bebasampah yang besar pula. Diasumsikan di Tahun 2023 sampah yang dihasilkan dari 24 kecamatan adalah sebesar 3.374.734 kg per hari atau setara dengan dengan 4.707 m³ /hari. Volume timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2018 sebesar ± 1,636.124 m³ per tahun. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah sekitar 819 m³ /hari atau sekitar 17,4 % dan yang dapat dikelola oleh Tempat Pengolahan Sementara (TPS) 3 R, bank sampah dan sektor informal lain adalah sekitar 178,9 m³ /hari atau sekitar 3,8%, dan sisanya sebesar 78,8% atau 3709,1 m³ /hari tidak dikelola. Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 2 (dua) unit Tempat Pengolahan Akhir sampah yang berlokasi di Desa Kenep Kecamatan Beji dan Desa Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, 38 unit TPS 3R, 44 unit bank sampah dan sekitar 40 lapak atau pengelola sampah (sektor informal) yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan

pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 10 kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada.

Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA berskala Kabupaten Pasuruan yang ada dan berfungsi saat ini adalah TPA Wonokerto di Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar 4,8 Ha. TPA Wonokerto memiliki kapasitas sebesar 2.000.000 m³ dan saat ini menampung volume eksisting tahun 2023 yaitu 400.000 m³. berdasarkan posisi hanya efisien untuk melayani wilayah bagian Utara-Barat Kabupaten Pasuruan (Kec. Beji, Gempol, Bangil, Kraton, Rembang, Pohjentrek dan Pandaan).

Saat ini kondisi operasional di TPA Wonokerto khususnya sel 1 sudah overload, sehingga sesuai dengan DED pembangunan TPA Wonokerto membutuhkan pembangunan sel 2 serta membutuhkan tambahan sarana dan prasarana pendukungnya atau optimalisasi TPA Wonokerto.

2. Meningkatnya tutupan lahan dan Ruang Terbuka hijau;

Berdasarkan data tahun 2023 tentang jumlah luasan ruang terbuka hijau publik mencapai 9,4 ha atau 0,00639% dari total luas Kabupaten Pasuruan. Hal ini belum memenuhi ketentuan jumlah luasan ruang terbuka hijau publik yang harus dicapai sebesar 30% dari total luas lahan. Selain luasan RTH yang kurang, terdapat RTH yang selain berfungsi sebagai kawasan resapan air juga merupakan landmark Kabupaten Pasuruan yaitu Alun-alun Bangil, dimana kondisinya kurang optimal sebagai perwujudan landmark, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi Alun-alun Bangil untuk menunjang Kecamatan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten.

3. Menurunnya luasan lahan kritis.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 11 tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2044, kawasan hutan lindung milik negara yang dikelola oleh PT. Perhutani yang terletak di Wilayah Kabupaten Pasuruan adalah seluas 7.225,30 Ha yang terletak menyebar di Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Pasrepan.

Kondisi saat ini lahan kritis di area atau kawasan penyangga semakin tinggi, yang dapat mengakibatkan bencana banjir bandang serta penurunan cadangan air bawah tanah, maka kegiatan rehabilitasi lahan kritis melalui metode revegetasi dan sipil teknis sangat diperlukan.

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Rancangan Akhir RKPD				Kode	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	Lokasi
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67%	Rp 7.007.650,00	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	66,67%	Rp572.528.600,00		Kab Pasuruan
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,71%	Rp 3.270.450,00	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	62,71%	Rp267.202.600,00		Kab Pasuruan
2.11.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH kabupaten/kota	3dokumen	Rp 268.950,00	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengkomodir	2 dokumen	Rp21.974.600,00		Kab Pasuruan
2.11.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 3.001.500,00	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp245.228.000,00		Kab Pasuruan
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	60,00%	Rp 3.737.200,00	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	60%	Rp305.326.000,00		Kab Pasuruan
2.11.02.2.02.0005	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Rp 3.737.200,00	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Rp305.326.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan udara	60%	Rp 1.498.876.500,00	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	60%	Rp3.106.974.230,00		Kab Pasuruan
		Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	50%	Rp 406.606.700,00				Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	50%	Rp531.561.000,00		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan	100%	Rp 1.492.948.500,00	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan	100%	Rp2.567.926.930,00		Kab Pasuruan
		Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	80%	Rp 1.894.700,00				Persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	80%	Rp154.798.300,00		
2.11.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	120 dokumen	Rp 1.420.074.500,00	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	120 dokumen	Rp1.639.999.600		Kab Pasuruan
2.11.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp 1.894.700,00	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp154.798.300		Kab Pasuruan
2.11.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1204 dokumen	Rp 71.974.000,00	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	1204 dokumen	Rp927.927.330		UPT Lab
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6%	Rp 4.933.300,00	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	6%	Rp384.249.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	60 laporan	Rp 4.266.900,00	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	60 laporan	Rp348.578.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	Rp 666.400,00	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 titik	Rp35.671.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	29%	Rp 406.606.700,00	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan	23%	Rp531.561.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	kegiatan	Rp -	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Kab. Pasuruan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	15 kegiatan	Rp531.561.000,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Rp -	2.11.04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan luasan RTH publik minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan	9,35%	Rp7.830.558.985,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 kegiatan	Rp 406.606.700,00	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	17,65%	Rp7.830.558.985,00		Kab Pasuruan
2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Rp -	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	Rp188.004.300,00		Kab Pasuruan
2.11.04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH publik minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan	9,35%	Rp 7.417.684.597,00	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pasuruan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kevenangan Kabupaten/Kota	850 ha	Rp7.642.554.685,00		Kab Pasuruan
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	17,65%	Rp 7.417.684.597,00	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Pasuruan	Persentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	67%	Rp472.803.333,00		Kab Pasuruan
2.11.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	Rp 2.300.000,00	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100%	Rp267.591.333,00		Kab Pasuruan

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	Lokasi
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.11.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	850 Ha	Rp	7.415.384.597,00	2.11.05.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Berusaha Berusaha	30 dokumen	Rp230.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	67%	Rp	5.201.840,00	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pemenuhan Limbah	30 laporan	Rp37.591.333,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100%	Rp	3.275.483,00	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Facilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100%	Rp205.212.000,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30 dokumen	Rp	2.815.342,00	2.11.05.2.02.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Berusaha Berusaha	1 dokumen	Rp4.712.000,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	30 laporan	Rp	460.141,00	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	3 laporan	Rp200.500.000,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Facilitasi pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten	100%	Rp	1.926.357,00	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Pasuruan	Persentase memurumnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin	47%	Rp622.253.790,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	Rp	44.232,00	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan	16%	Rp622.253.790,00		Kab Pasuruan
2.11.05.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	3 dokumen	Rp	1.882.125,00	2.11.06.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Daerah yang Diberikan	30 dokumen	Rp195.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase memurumnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47%	Rp	7.616.321,00	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 orang	Rp380.298.290,00		Kab Pasuruan
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	16%	Rp	7.616.321,00	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	15 badan usaha	Rp46.955.500,00		Kab Pasuruan
2.11.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	30 dokumen	Rp	2.386.921,00	2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	33%	Rp84.020.200,00		Kab Pasuruan
2.11.06.2.01.0007	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang	Rp	574.500,00	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang diakui	1 lembaga	Rp50.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.06.2.01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Persetujuan Berusaha	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	16 Badan Usaha	Rp	4.654.900,00	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	8 dokumen	Rp50.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	33%	Rp	1.028.400,00	2.11.08.2.01	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	3 lembaga	Rp34.020.200,00		Kab Pasuruan
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang diakui	1 lembaga	Rp	612.000,00	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait	3 dokumen	Rp34.020.200,00		Kab Pasuruan
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak	10 dokumen	Rp	612.000,00	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Pasuruan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Pomes, Kemasyarakatan yang diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitasnya	7,54%	Rp350.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.07.2.02	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	3 lembaga	Rp	416.400,00	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah lembaga Sekolah, Perusahaan, Pomes, Kemasyarakatan yang diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitasnya	95 lembaga	Rp350.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	3 dokumen	Rp	416.400,00	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang	4 dokumen	Rp350.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Pomes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	7,54%	Rp	82.044.000,00	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH	3,17%	Rp70.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Sekolah, Perusahaan, Pomes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	95 lembaga	Rp	82.044.000,00	2.11.09.2.01	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH	5%	Rp70.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	Rp	82.044.000,00	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	Rp70.000.000,00		Kab Pasuruan
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH	3,17%	Rp	856.800,00	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kab. Pasuruan	Persentase Meningkatnya ketepatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH	100%	Rp143.368.100,00		Kab Pasuruan
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	5%	Rp	856.800,00	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang	100%	Rp143.368.100,00		Kab Pasuruan
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	Rp	856.800,00	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang	15 pengaduan	Rp97.834.200,00		Kab Pasuruan
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya ketepatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten/Kota	100%	Rp	1.754.600,00	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dianggap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang dianggap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 perkara	Rp45.533.900,00		Kab Pasuruan
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	100%	Rp	1.754.600,00	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Persentase capaian penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	78%	Rp15.852.936.278,00		Kab Pasuruan

Kode	Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan									
(1)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting	Lokasi		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14		
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 pengaduan	Rp 1.197.500,00			Kab. Pasuruan	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	43,7%	Rp1.961.146.479,00		Kab Pasuruan		
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6 perkara	Rp 557.100,00	2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Persentase capaian pengurangan sampah	23,40%	Rp1.961.146.479,00		Kab Pasuruan		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	78%	Rp 9.963.648.729,00	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Persentase capaian penanganan sampah	30%	Rp15.852.936.278,00		Kab Pasuruan		
		Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	43,7%	Rp 24.005.645,00				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Rp100.000.000,00		DLH		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase capaian penanganan sampah	23,40%	Rp 9.963.648.729,00	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	99.683 ton	Rp1.516.146.479,00		100rb KK di wilayah Kab. Pasuruan		
		Persentase capaian pengurangan sampah	30,6%	Rp 24.005.645,00	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25 unit	Rp6.445.944.000,00				
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Rp 1.224.061,00	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, atau Pengolahan Sampah Berbasis	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, atau Pengolahan Sampah Berbasis	127.798 ton	Rp7.982.092.800,00		pengelolaan tingkat desa/keurahan/kawasan (Rp. 850.000/ton)		
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	99.683 ton	Rp 18.558.571,00	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Pasuruan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	42.599 ton	Rp903.370.600,00		pemrosesan akhir --> Rp 125.000/ton		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, Pengolahan Sampah Berbasis	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, atau Pengolahan Sampah Berbasis	127.798 ton	Rp 97.665.000,00	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Kab. Pasuruan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	33 kelompok	Rp345.000.000,00		Kab Pasuruan		
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	33 kelompok	Rp 4.223.013,00	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp150.955.878,00		Kab Pasuruan		
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 1.809.000,00	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 unit	Rp370.573.000,00		TPA Wonokerto		
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	25 unit	Rp 2.043.470.729,00	01;02;01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	Rp13.345.259.837,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 unit	Rp 7.761.500.000,00	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen	100%	Rp276.950.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8591 ton	Rp 59.204.000,00	1.02.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp140.450.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100%	Rp 9.582.663.720,00	1.02.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp15.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen	100%	Rp 3.391.200,00	1.02.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp10.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Rp 1.720.900,00	1.02.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp13.500.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 183.600,00	1.02.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp8.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Rp 122.400,00	1.02.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 laporan	Rp10.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 165.300,00	1.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp80.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	Rp 97.800,00	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp10.397.283.177,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Rp 122.400,00	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	Rp8.954.983.329,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp 978.800,00	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	Rp1.387.099.848,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	Rp 9.408.196.105,00	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	Rp20.000.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	Rp 8.710.363.221,00	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	19 laporan	Rp35.200.000,00		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	Rp 697.157.284,00	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis/Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen			Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas		

Kode (1)	Rancangan Akhir RKPD				Kode (7)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (13)	Lokasi -14
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (4)	Target Capaian (5)	Pagu Indikatif (Rp.000) (6)		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (8)	Lokasi (9)	Indikator Kinerja (10)	Target Capaian (11)	Kebutuhan Dana (Rp.000) (12)		
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	Rp 244.800,00	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp21.851.060		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 laporan	Rp 430.800,00	1.02.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	Rp14.491.060		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan	100%	Rp 991.420,00	1.02.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	Rp7.360.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	Rp 991.420,00	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp180.500.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 dokumen	Rp -	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang	Rp109.000.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	Rp 600.000,00	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	325 unit	Rp71.500.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp 600.000,00	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	Rp586.344.600		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	355 unit	Rp -	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp12.068.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	Rp 8.933.900,00	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	Rp14.233.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	Rp 100.000,00	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	Rp65.339.150		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 1.366.000,00	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	Rp58.199.100		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	Rp 780.000,00	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Rp79.263.650		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	Rp 735.000,00	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	Rp1.108.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 1.144.900,00	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp52.733.700		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	Rp -	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp303.400.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 520.000,00	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	Rp1.288.366.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 4.288.000,00	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Rp764.021.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	Rp 7.818.495,00	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Rp376.363.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Rp -	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	Rp52.205.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp 4.500.495,00	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Rp47.769.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	Rp 3.318.000,00	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	Rp18.008.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 142.562.000,00	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp138.250.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	Rp 141.800.000,00	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	Rp126.750.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Rp 762.000,00	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	Rp11.500.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	Rp 10.178.600,00	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD kondisi baik	100%	Rp485.715.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 6.182.600,00	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	Rp357.465.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas

Rancangan Akhir RRPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting	Lokasi	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	-14	
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Rp	100.000,00	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 unit	Rp2.250.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp	750.000,00	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	Rp19.500.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp	2.376.000,00	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp99.000.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp	762.000,00	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	Rp7.500.000		Dinas Lingkungan Hidup Kab Pas
				Rp 28.998.995.502									

Rp 44.943.410.832,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam dan forum OPD, *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dibahas dalam Musrenbangkab untuk mematangkan/memutakhirkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup, selain harus berpedoman pada Renstra yang ada, juga harus mempertimbangkan hasil Musrenbangkab/RKPD final yang mengarah pada dukungan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025.

Tabel 2.11
 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
 Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan)		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang dikelola lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Kampung baru desa sentuk kecamatan purwodadi		1 Paket	
		Desa purwodadi Kecamatan Purwodadi		1 Paket	
		Jl. Mawar kelurahan Ledug kecamatan prigen		1 Paket	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan udara Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah		
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis		
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		
		Kabupaten Pasuruan		1 Kegiatan	
		Kelurahan Pencalukan Kecamatan Prigen		1 Kegiatan	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol		1 Kegiatan	
3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
		Kabupaten Pasuruan		1 Kegiatan	
		Kecamatan Pasrepan, Kejayan , Gondangwetan, Winongan, Lumbang, Grati, Nguling, Lekok, Rejoso		20 Kegiatan	
		Desa sumbersuko , desa carat, dan desa legok		3 Kegiatan	
	Program Pengelolaan Persampahan		Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA		
			Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA		
	Pengelolaan Sampah		Persentase capaian penanganan sampah		
			Persentase capaian pengurangan sampah		
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik		
		Desa Kejapanan, Kab. Pasuruan		4 unit	
		Desa Sumbersuko, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan		3 unit	
		Ds Slambricit, Ds Kalirejo Kec Kraton , Kab. Pasuruan		6 unit	
		Desa Jatiarjo Kec Prigen, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Watuagung Kec Prigen, Kab. Pasuruan		1 unit	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Slamprit Kec. Kraton, Kab. Pasuruan		5 unit	
		Kendaraan Roda 3 Desa Tunggulwulung kec pandaan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Lingkungan gunungsari Kelurahan Pecalukan Kec Prigen, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Dusun Bangle Desa Gunung gangsir kec beji kab pasuruan, Kab. Pasuruan		2 unit	
		Dusun Talun Desa Gununggangsir Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		2 unit	
		Dusun Kedungboto Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		2 unit	
		Desa Kenep Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Cangkring malang Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		2 unit	
		Desa Baujeng Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Sidowayah Kec Beji Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		2 unit	
		pondok pesantren al istiqomah dusun ngemplak desa toyaning kecamatan rejos, Kab. Pasuruan		1 unit	
		desa rejos lor kecamatan rejos, Kab. Pasuruan		1 unit	
		DESA ROWO GEMPOL KECAMATAN LEKOK, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Dusun Sambisari RT 001 RW 03 Desa Gayam Kecamatan Gondangwetan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Slamprit Kec.Kraton, Kab. Pasuruan		4 unit	
		Dusun Gempol Baru Desa Gempol Kab Pasuruan , Kab. Pasuruan		2 unit	
		Kecamatan Gempol, Beji dan Bangil, Kab. Pasuruan		20 unit	
		Desa gerbo, kecamatan		1 unit	
		Dsn Jurang Ds. Tebas Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Karangpandan Kec. Rejos Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan		2 unit	
		Dusun SUMBERINGIN RT:006/RW:005 Desa sumbersuko Kec. Gempol, Kab. Pasuruan		1 unit	
		DUSUN MANTINGAN RT 001 RW 002 DESA TENGILISREJO KECAMATAN GONDANGWETAN, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Klakah Kec Paserpan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Pandanrejo Kec Rejos, Kab. Pasuruan		1 unit	
		KABUPATEN, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Lingkungan Palembang Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Purwodadi kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Rembang Kec. Rembang, Kab. Pasuruan		1 unit	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Karangsono Kec. Wonorejo, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Wedoro Kec Pandaan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Dusun Gendol 02/06 Desa Pakukerto Kec Sukorejo, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Lumbangrejo Kec Prigen, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Ds. Pleret Pohjentrek, Ds. Wonorejo Kec. WOnorejo, Pondok Pesantren ISHLAH Wonorejo, Ds. Genengwaru Kec. Rembang, Kab. Pasuruan		4 unit	
		Jogonalan Rt 01 Rw 04 Jogosari Kec Pandaan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Dusun Krajan Desa Lumbangrejo Kec Prigen Kab Pasuruan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa di Kecamatan Nguling, Kab. Pasuruan		5 unit	
		Desa Ambal Ambil Kejayan , Kab. Pasuruan		1 unit	
		Yayasan Mambaus sholach Dsn getah kidul desa minggir Kec. Winongan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		TPQ Al- ismailyah Dusun Kalitengah rt08 Rw.02 Desa Oro oro pule Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		PP Asholach Kejeron Bayeman gondang wetan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Se Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan		20 unit	
		Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Kecamatan Pandaan , Kab. Pasuruan		3	
		Desa Pekangkungan Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Wonosari Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Kayukebek Kecamatan		1 unit	
		Desa Andonosari Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Ngadisari Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Lebakrejo, Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Cowek Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Semut Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Yayasan Uswatun Khasanah, Dusun Ngawen Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Dusun Karang tengah Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Madin AL Furqon Rembang, Kab. Pasuruan		1 unit	
		Desa Manaruwi Kec. Bangil, Kab. Pasuruan		1 unit	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kec Paserpan, Kejayan, Gd wetan, Winongan, Lumbang, Grati, Nguling, Lekok, Rejoso,, Kab. Pasuruan		20 unit	
		SE WILAYAH KABUPATEN PASURUAN, Kab. Pasuruan		5 unit	
		Desa Kedungpengaron kec. Kejayan, Kab. Pasuruan		1 unit	
		semua kecamatan, Kab. Pasuruan		30 unit	
		Desa Wonosari Kecamatan Tuttur, Kab. Pasuruan		3 unit	
		Desa Brambang Kec. Gondangwetan, Kab. Pasuruan		1 unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 tertuang Visi abadi Indonesia diterjemahkan sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Penjabaran dari Visi abadi yang berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu **Visi “Berkelanjutan”** yaitu dimana kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik

berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu **sasaran kelima “intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*”**, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi GRK di tahun 2010, menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Agenda pembangunan Indonesia Emas berjumlah 8 (delapan), terdapat 3 (tiga) agenda yang berkaitan dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Agenda kedua **“transformasi ekonomi”**, yaitu untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), **penerapan ekonomi hijau**, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;
- 2) Agenda kelima **“Ketahanan sosial Budaya dan Ekologi”**, yaitu dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko

bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan;

- 3) Agenda ketujuh “**dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**”, yaitu menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

Arah (tujuan) pembangunan yang berjumlah 17 (tujuh belas) terdapat 4 (empat) tujuan yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Penerapan ekonomi hijau;
- 2) Lingkungan hidup yang berkualitas;
- 3) Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan;
- 4) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	n/a	1,11%	2,26%
Sasaran I : Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Persentase Upaya Penuaan Lingkungan Hidup	n/a	12,50%	12,50%
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	n/a	52,17%	64,55%
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	55%	60%
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	n/a	46,67%	53,33%
Sasaran II : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip DLH	82,80 poin	85 poin	88 poin
IKK				
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan		65,47	62,504 poin	62,741 poin
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	56,98	53,59 poin	53,62 poin
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,46	81,04 poin	81,10 poin

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46,76	43,53 poin	43,55 poin
2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten		22,08%	45%	54%
	a. Tersedianya data dan informasi penanangan sampah di wilayah kabupaten/kota		10%	10%
3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		55,56%	46,67%	53,33%
	a. Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	91,58%	100%	100%
	b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,14%	0,13%	0,13%
	c. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	100%	67%	83%
	d. Terasilasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		17%	25%
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	100%	100%

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
	f. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	100%

Tabel 3.1.A				
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
Tujuan : Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		1,11%	2,26%
Sasaran I : Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidu	Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup		12,50%	12,50%
	Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3		52,17%	64,55%
	Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		55%	60%
	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah		46,67%	53,33%
Sasaran II :Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip DLH		85,00	88,00
IKK Outcome				
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan		65,47	62,504 poin	62,741 poin
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	56,98	53,59 poin	53,62 poin
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,46	81,04 poin	81,10 poin
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	46,76	43,53 poin	43,55 poin
2. Terlaksananya Pengelolaan Smapah di Wilayah Kabupaten		22,08%	45%	54%
	a. Tersedianya data dan informasi penanangan sampah diwilayah kabupaten/kota		10%	10%

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Target 2025
3. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota		55,56%	47%	53%
	a. Data izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	91,58%	100%	100%
	b. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0,14%	13%	13%
	c. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	100%	67%	83%
	d. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		17%	25%
	e. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	100%	100%
	f. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	100%

Tabel 3.2
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPD dan IKU

Indikator Sasaran RPD			IKU								
Indikator	Formulasi	Target 2025	Indikator	Formulasi					Target 2025	Program	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Kab/kota = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219x IKTL)	62,504	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	IKLH Tahun berjalan - IKLH base line (2023)	x100 %	+	IKPS Tahun berjalan - IKPS base line (2023)	x100%	2,26%		
				IKLH base line (2023)			IKPS base line (2023)				
			Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Jumlah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik perkotaannya+private dalam kategori cukup)					x100%	12,50%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Jumlah Kecamatan di kabupaten							
			Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3	Jumlah Desa yang terakses upaya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan)	+	Jumlah Kecamatan yang Bebas Dumping LB3		x100%	64,55%	Program pengelolaan persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
				Jumlah seluruh Desa dan Kelurahan Di Kab. Pasuruan		Jumlah Seluruh Kecamatan di Kab. Pasuruan					
			Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan	Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi Baku Mutu					x100%	60%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan							
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda					x100%	53,33%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pembinaan da Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan							
			Nilai SAKIP DLH	Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT)						88,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan

3.3 Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 akan dilakukan melalui 1 program penunjang dan 10 program utama , 23 kegiatan dan 68 sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perbedaan yang signifikan tentang nama program, kegiatan maupun sub kegiatan, serta mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra 2024-2026

3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota:

1. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

II. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

C. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

4. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
5. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

7. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

8. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- E. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:
 9. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
- III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
 - F. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota:
 10. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
 11. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- IV. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
 - G. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3:
 12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 13. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 14. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 15. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan;
- V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
 - I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 16. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 17. Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

18. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH

- J. Kegiatan Pengakuan MHA, karifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH:

19. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA karifan lokal atau pengetahuan tradisional dan HAK kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait PPLH;

- K. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

20. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH;

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- L. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:

21. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- M. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

22. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- N. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota:

23. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

24. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

X. Program Pengelolaan Persampahan

- O. Kegiatan Pengelolaan Sampah:

25. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
26. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
27. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
28. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
29. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
30. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
31. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah;
32. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

P. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daaerah

- 33.Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 34.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 35.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 36.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 37.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 38.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 39.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Q. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 40.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 41.Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 42.Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD;
- 43.Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD;

R. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:

44. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD;

S. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

45. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

T. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

46. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

47. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

48. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

49. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

50. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

51. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;

52. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

U. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

53. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

54. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

55. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

56. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

W. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

57. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

58. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;

59. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

60. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

61. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PEMETAAN NOMENKLATUR PROG/KEG/SUBKEG PADA DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023																			
Perangkat Daerah		: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN																	
Urusan Yang Diampu		: LINGKUNGAN HIDUP																	
DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023													
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur		Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	EVALUASI		KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur		Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN					
	1) Bidang Urusan					Diisi :			1) Bidang Urusan										
	2) Program					- Pemutakhiran; atau			2) Program										
	3) Kegiatan					- Penonaktifan;			3) Kegiatan										
	4) Subkegiatan								4) Subkegiatan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
	Urusan Lingkungan Hidup						Urusan Lingkungan Hidup												
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	x 100%	%		2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	x 100%	%							
			Jumlah lap/dok. perencanaan lingkungan hidup sesuai regulasi yang terjamin																
			jumlah lap/dok yang harus dipenuhi																
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup alam	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	x 100%	%		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatkan penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup alam	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	x 100%	%							
			memenuhi indikator kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas																
			jumlah total indikator kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen	Pemutakhiran	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan		dokumen	Karena sub kegiatan ini secara subtansi menjadi penyusun dari sub kegiatan yg lama yaitu Penetapan RPPLH						
							2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH kabupaten/Kota			Karena sub kegiatan ini secara subtansi menjadi penyusun dari sub kegiatan yg lama yaitu Penyusunan RPPLH						
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		dokumen	Pemutakhiran	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		dokumen	Pemutakhiran Kodifikasi						
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	x 100%	persen		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Meningkatkan efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	x 100%	persen							
			jumlah Dokumen KLHS yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program																
			jumlah Dokumen KLHS yang telah disusun/divalidasi																
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen	Pemutakhiran	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen	Pemutakhiran Kodifikasi						
2.11.02.2.01.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen	Pemutakhiran	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		dokumen	Pemutakhiran Kodifikasi						
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara serta luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	x 100%	persen		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara serta luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	x 100%	persen							
			jumlah parameter pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu																
			jumlah parameter pemantauan kualitas lingkungan																
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	x 100%	persen					Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	x 100%	persen							
			jumlah kecamatan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis																
			jumlah kecamatan yang memiliki lahan kritis																
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut dan sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	x 100%	persen		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut dan sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	x 100%	persen							
			Jumlah dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan																
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas lingkungan Hidup (Pengujian kualitas air sungai/danau, air limbah dan udara ambien)																
			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	x 100%	persen					persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	x 100%	persen							
			Jumlah Sektor Dokumen Inventarisasi GRK yang dilaksanakan																
			Jumlah Sektor Dokumen Inventarisasi GRK (Sektor: Limbah, Industri, Pertanian, Energi dan Kehutanan)																

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN	
	1) Bidang Urusan				1) Bidang Urusan							
	2) Program				2) Program							
	3) Kegiatan				3) Kegiatan							
	4) Subkegiatan				4) Subkegiatan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Meningkatnya kualitas Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Meningkatnya kualitas Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanaaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengambilan Contoh Uji,Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Meningkatnya pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium	dokumen	Perubahan indikator yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Jumlah kegiatan usaha yang menjadi kewenangan kabupaten pasuruan	x 100%	%	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Jumlah kegiatan usaha yang menjadi kewenangan kabupaten pasuruan	x 100%	%	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Meningkatnya kualitas Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Meningkatnya kualitas Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan koordinasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilakukan Jumlah stake holder lingkungan	x 100%	%	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan koordinasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilakukan Jumlah stake holder lingkungan	x 100%	%	
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Meningkatkan kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersih Unsur Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Meningkatkatnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	kegiatan	Perubahan Kodefikasi,indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama	
2.11.03.2.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remedias	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Meningkatnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Perubahan Kodefikasi, indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Meningkatkan kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Meningkatkatnya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Perubahan Kodefikasi,indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama	
2.11.03.2.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	dokumen	PEMUTAKHIRAN	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	kegiatan	Perubahan Kodefikasi, indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya luasan RTH publik	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab.Pasuruan) Luas RTH publik eksisting Luasan target RTH publik (20% wilayah perkotaan)	x 100%	persen	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya Luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	Luas RTH publik eksisting Luasan target RTH publik (20% wilayah perkotaan)	x 100%	persen	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun Penambahan Luasan RTH Publik Luasan RTH eksisting (baseline)	x 100%	persen	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Meningkatnya Luasan RTH publik dalam satu tahun	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun Penambahan Luasan RTH Publik Luasan RTH eksisting (baseline)	x 100%	persen	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk PengelolaanKehati yang Disusun	dokumen	Pemutakhiran	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Meningkatnya Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	Pemutakhiran	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Meningkatnya Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	Perubahan indikator berserta satuannya mempengaruhi , sehingga target dikonsersi menajdi angka taret yang baru	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	Pemutakhiran	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	ha	Pemutakhiran Kodefikasi	

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN	
	1) Bidang Urusan						1) Bidang Urusan					
	2) Program						2) Program					
	3) Kegiatan						3) Kegiatan					
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	2. Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan 3.(Kecamatan/Desa/Usaha dan/atau Kegiatan/Lembaga pemerintah)	x 100%	%	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pendampingan/Pembinaan/Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan	2. Kegiatan Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan 3.(Kecamatan/Desa/Usaha dan/atau Kegiatan/Lembaga pemerintah)	x 100%	%	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 Jumlah dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Jumlah permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang masuk	x 100%	%	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 Jumlah dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Jumlah permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang masuk	x 100%	%	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	Pemutakhiran	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		Laporan	Pemutakhiran	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3		Laporan	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten Jumlah penerbitan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten Jumlah permohonan persetujuan teknis dan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang masuk	x 100%	%	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitas pengumpulan Limbah B3 di Wilayah Kabupaten	Fasilitas pengumpulan LB3 di wilayah Kabupaten Jumlah penerbitan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan Limbah B3 skala Kabupaten Jumlah permohonan persetujuan teknis dan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang masuk	x 100%	%	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	Pemutakhiran	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		dokumen	Pemutakhiran	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	x 100%	persen	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	x 100%	persen	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Jumlah Kumulatif Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Jumlah seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan yang izimya diterbitkan Pemkab. Pasuruan (sasaran/objek pengawasan)	x 100%	persen	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Jumlah Kumulatif Pengawasan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan Jumlah seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan yang izimya diterbitkan Pemkab. Pasuruan (sasaran/objek pengawasan)	x 100%	persen	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Meningkatnya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		dokumen	Pemutakhiran	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		orang	Pemutakhiran	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		orang	Perubahan indikator yang baru secara substantif tidak berbeda,

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023							
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN		
	1) Bidang Urusan						Diisi :					1) Bidang Urusan	
	2) Program						- Pemutakhiran; atau					2) Program	
	3) Kegiatan						- Penonaktifan;					3) Kegiatan	
	4) Subkegiatan											4) Subkegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)			
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemutakhiran	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Penundng-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	Perubahan sub kegiatan, indikator dan satuannya yang baru secara subntatif tidak berbeda, sehingga nilai target sama		
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	dokumen	PENONAKTIFAN						Sub kegiatan tidak ada di dalam kepmendagri		
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Masyarakat Hukum Adat yang diakui sesuai dengan usulan Masyarakat Hukum Adat	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintan Desa Jumlah potensi desa adat (MHA)	x 100%	persen	2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Masyarakat Hukum Adat yang diakui sesuai dengan usulan Masyarakat Hukum Adat	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA Jumlah MHA yang Diakui oleh pemerintan Desa Jumlah potensi desa adat (MHA)	x 100%	persen		
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya jumlah MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui disusunnya Peraturan Desa tentang Lembaga Desa Adat	lembaga		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya jumlah MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui disusunnya Peraturan Desa tentang Lembaga Desa Adat	lembaga			
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokumen	Pemutakhiran	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi		
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang mendapat kegiatan peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup	lembaga	Pemutakhiran	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang mendapat kegiatan peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup	lembaga			
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	dokumen	Pemutakhiran	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi		
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga Sekolah,Perusahaan, Ponpes,Kemasyarakatan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelompok / Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten	x 100%	persen	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga Sekolah,Perusahaan, Ponpes,Kemasyarakatan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelompok / Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kabupaten	x 100%	persen		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Perusahaan, Sekolah, Ponpes, Pondok pesantren dan filantropi yang dibina	lembaga		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Perusahaan, Sekolah, Ponpes, Pondok pesantren dan filantropi yang dibina	lembaga			
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pendampingan Pembinaan Gerak Pedili dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	Pemutakhiran	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pendampingan Pembinaan Gerak Pedili dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi		
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya baik/sangat baik Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten	x 100%	persen	2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya baik/sangat baik Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten	x 100%	persen		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya sesuai standar Kabupaten Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten	x 100%	persen	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar	Jumlah Perusahaan, sekolah, pondok pesantren yg kinerja PPLH nya sesuai standar Kabupaten Jumlah lembaga yang belum memiliki penghargaan di kabupaten	x 100%	persen		

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023									
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN				
	1) Bidang Urusan														
	2) Program														
	3) Kegiatan														
	4) Subkegiatan														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi ophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	Pemutakhiran	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	Pemutakhiran Kodefikasi				
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Presentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	x 100%	persen	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Dokumentasi hasil tindak lanjut penanganan pengaduan melalui koordinasi dan sinkronisasi penerapan Sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	x 100%	persen				
			pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti												
			pengaduan bidang PPLH yang ditindaklanjuti												
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	x 100%	persen	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	x 100%	persen				
			jumlah pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti												
			jumlah pengaduan di bidang PPLH yang masuk												
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ Ditangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	dokumen	Pemutakhiran	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ Ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditanganii	pengaduan	Perubahan sub kegiatan, indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama				
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	dokumen	Pemutakhiran	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	perkara	Perubahan sub kegiatan, indikator dan satuannya yang baru secara substantif tidak berbeda, sehingga nilai target sama				
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	x 100%	persen	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	Persentase capaian pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	x 100%	persen				
			Capaian pengurangan sampah												
			Target pengurangan sampah pada Jakstrada	x 100%	persen				Target pengurangan sampah pada Jakstrada						
			Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA						Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA						
2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen	2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen				
			Jumlah sampah yang terdaurulang di sumber melalui pengomposan + (potensi timbulan sampah Kab. Pasuruan - sampah tertangani di Bank Sampah/TPS 3R/metode lainnya)												
			Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan	x 100%	persen				Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan						
			Persentase capaian penanganan sampah						Persentase capaian penanganan sampah						
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Persentase capaian pengurangan sampah	x 100%	persen				
			Jumlah sampah yang terangkut untuk ditangani						Jumlah sampah yang terangkut untuk ditangani						
			Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan	x 100%	persen				Jumlah timbulan sampah Kab. Pasuruan						
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Meningkatnya kualitas Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	Pemutakhiran	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Meningkatnya jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton	berdasarkan kegiatan existing yg dapat diukur kinerjanya adalah pengurangan sampah dengan melakukan pendauran ulang				
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	ton	Pemutakhiran	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	unit	berdasarkan kegiatan existing yg dapat diukur kinerjanya adalah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023							
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator		Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator		Satuan indikator	KETERANGAN
	1) Bidang Urusan					Diisi :		1) Bidang Urusan					
	2) Program					- Pemutakhiran; atau		2) Program					
	3) Kegiatan					- Penonaktifan;		3) Kegiatan					
	4) Subkegiatan							4) Subkegiatan					
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(10)		(11)	(12)
							2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Meningkatnya Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		ton	berdasarkan kegiatan existing yg dapat diukur kinerjanya adalah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Meningkatnya sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		ton	berdasarkan kegiatan existing yg dapat diukur kinerjanya adalahPenanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok	Pemutakhiran	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		kelompok	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen	Pemutakhiran	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		unit	Pemutakhiran	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		unit	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi jumlah lap/dok yang harus dipenuhi (lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan)	x 100%	persen		2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi Jumlah lap/dok adm PD yang akurat/sesuai regulasi dibagi jumlah lap/dok yang harus dipenuhi (lap/dok adm adalah yang dimaksud pada kegiatan)	x 100%	persen	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan	x 100%	persen		2.11.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan	x 100%	persen	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD sesuai dengan ketentuan		dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan	Pemutakhiran Kodefikasi
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		laporan	Pemutakhiran Kodefikasi

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023						
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	EVALUASI	KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN	
	1) Bidang Urusan											
	2) Program											
	3) Kegiatan											
	4) Subkegiatan											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi jml laporan harus dipenuhi	x 100%	persen	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi jml laporan harus dipenuhi	x 100%	persen	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas Orang yang Menerima Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Pemutakhiran	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Koordinasi dari Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Koordinasi dari Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan anan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognos is Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognos is Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan /dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan jml laporan/dok BMD yg akurat dibagi jml lap/dok BMD yg harus dipenuhi	x 100%	persen	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan /dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan jml laporan/dok BMD yg akurat dibagi jml lap/dok BMD yg harus dipenuhi	x 100%	persen	
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatny a kualitas Dokumen Pengamanan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatny a kualitas Dokumen Pengamanan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatny a Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Pemutakhiran	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatny a Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi	x 100%	persen	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi	x 100%	persen	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Pemutakhiran	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi	x 100%	persen	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi	x 100%	persen	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan	x 100%	persen	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan	x 100%	persen	
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Pemutakhiran Kodefikasi	

DOKUMEN RENSTRA PD 2024-2026						EVALUASI TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023								
KODE KLASIFIKASI	Nomenklatur		Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan indikator	EVALUASI		KODE KLASIFI-KASI	Nomenklatur		Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi indikator	Satuan indikator	KETERANGAN
	1) Bidang Urusan					Diisi :	1) Bidang Urusan							
	2) Program					- Pemutakhiran; atau	2) Program							
	3) Kegiatan					- Penonaktifan;	3) Kegiatan							
	4) Subkegiatan						4) Subkegiatan							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(10)		(11)	(12)	
2.11.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan	x 100%	persen		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan	x 100%	persen		
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	Pemutakhiran	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik jml BMD kondisi baik dibagi jml BMD yg terregister	x 100%	persen		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik jml BMD kondisi baik dibagi jml BMD yg terregister	x 100%	persen		
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Pemutakhiran	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit	Pemutakhiran Kodefikasi	

3.3.1. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Dalam menjalankan strategi “**pengelolaan air limbah**”, perlu disusun kegiatan secara sistematis tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049, serta peraturan lainnya terkait pengelolaan air limbah di kabupaten Pasuruan.

Pengelolaan air limbah sekaligus menjadi langkah paralel dalam mewujudkan indikator sasaran DLH yaitu meningkatkan Indeks Kualitas air (IKA). Capaian IKA tahun 2023 yaitu 56,98 dengan interpretasi kondisi kualitas air di Kabupaten Pasuruan pada level SEDANG, maka strategi yang dibutuhkan yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1	Limbah sektor lingkungan (Industri, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Rumah makan, Hotel) yang memiliki IPAL berizin 195, sedangkan jumlah pengujian sektor lingkungan $\pm 50 = 25,64\%$	DLH	Pengambilan sampel limbah cair lingkungan	Kabupaten Pasuruan	Sasaran sektor lingkungan bersinergi dengan sub koordinator pencegahan dan pencemaran lingkungan, satpol PP
			Pengujian kualitas limbah cair lingkungan	UPT Laboratorium	Sinergi dengan DLH Prov Jatim
			Pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium	UPT Laboratorium	Bersinergi dengan sub koordinator pencegahan pencemaran lingkungan
			Pelatihan peningkatan sumber daya manusia	UPT Laboratorium	Sinergi dengan KLHK dan DLH Prov Jatim
			Pengembangan peralatan dan maintenance	UPT Laboratorium	Sinergi dengan DLH Prov Jatim
			Pelaksanaan survailent akreditasi	UPT Laboratorium	Sinergi dengan KLHK dan Komite

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
					Akreditasi Nasional (KAN)

Dalam menjalankan strategi “**pengelolaan sampah & pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular**”, perlu disusun kegiatan secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049 dan Perbup Nomor 40 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1.	Potensi timbulan sampah kawasan permukiman tahun 2025= 185.105 ton (Sumber: Update perhitungan data DLH, 2024)	DLH	<u>Uraian</u> Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan “Sampah Rumah Tangga” bagi Kawasan Permukiman <u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1.Bapperida, 2.Dinas PUSDA CK-TR 3.Dinas Perkim 4. Kecamatan Swata dan akademisi
2.		DLH	<u>Uraian</u> Pembinaan Desa/Kelurahan Berseri Kategori: Pratama, Madya, Mandiri <u>Sub Kegiatan</u> Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Desa/kelurahan usulan: 1. Randupitu 2. Sukolelo 3. Kel. Pandaan 4. Suwayuwo 5. Tanjungsari 6.Martopuro 7.Glagahsari 8. Keboncandi 9. Pacarkeling 10.Sumbersuko	Sinergi dan koordinasi: 1.Dinas PUSDA CK-TR, 2. Dinas Perkim 3. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 4. Dinas Perikanan 5.Dinas Peternakan 6. Kecamatan Swata dan akademisi
3.			<u>Uraian</u>	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
			Pembinaan pengurangan sampah untuk kader lingkungan <u>Sub Kegiatan</u> Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		1.PKK 2.Dharma Wanita 3.Dinas Koperasi & UMKM 4.Dinas Perindag 5. Kecamatan 6. Organisasi kemasyarakatan Swata dan akademisi
4.			<u>Uraian</u> Penyusunan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat <u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1. Legislatif 2. Bapperida 3. Inspektorat 4. BPKPD 5. DPMD 6. Swata dan akademisi
5.			<u>Uraian</u> Pengembangan/pelaporan data pengelolaan sampah berbasis masyarakat <u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1. Kecamatan 2. Desa/Kelurahan Swata dan akademisi
6.	Potensi timbulan sampah kawasan non permukiman * tahun 2025= <u>246.806 ton</u> (Sumber:	DLH	<u>Uraian</u> Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan "Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga" bagi Kawasan Non Permukiman <u>Sub Kegiatan</u> Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah	Kab Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1. Bapperida, 2. Dinas PUSDA CK-TR 3. Dinas Perindag 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Pariwisata 6. Dinas Pendidikan & Kebudayaan

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
	Update perhitungan data DLH, 2024) *Kawasan non permukiman : Kawasan komersial (pasar, pusat perniagaan, pariwisata, kantor), Kawasan industri, Kawasan khusus, Fasilitas pendidikan, Fasilitas sosial, Fasilitas umum, dan/atau Fasilitas lainnya		Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Swata dan akademisi
7.		DLH	<u>Uraian</u> Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pengelolaan sampah berupa poster/banner di kawasan non permukiman <u>Sub Kegiatan</u> Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1. Dinas Perindag 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
8.	Potensi residu yang diangkut dan diproses	DLH	<u>Uraian</u> Operasional pengangkutan residu ke TPA:	TPA Wonokerto	

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
	akhir di TPA tahun 2025= 36.500 ton (8% dari total potensi timbulan sampah)		- BBM truk sampah - BBM mobil operasional - BBM kendaraan roda tiga - Gaji Sopir dan kernet - Pemeliharaan kendaraan pengangkutan residu dan kendaraan operasional - Service kendaraan pengangkut - Service kontainer - Gaji tukang las dan tukang service - Pengadaan ban, suku cadang dll sarpras kendaraan <u>Sub Kegiatan</u> Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		
9		DLH	<u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA		
10		DLH	<u>Uraian</u> Operasional pemrosesan residu di TPA: - BBM alat berat - Gaji operator TPA - Gaji tenaga administrasi TPA - Uji laboratorium kualitas lindi TPA <u>Sub Kegiatan</u> Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA	TPA Wonokerto & TPA Kenep	Sinergi dan koordinasi: 1. Laboratorium Lingkungan DLH DLH Prov Jawa Timur

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
11	Potensi timbunan sampah yang ditangani masyarakat dan kawasan tahun 2025 = 395.411 ton (92% dari total potensi timbunan sampah)	DLH	<u>Uraian</u> - Sarana pengumpulan sampah terpilah (kendaraan roda tiga, dll) - Sarana pengolahan sampah - Insentif bagi pengelola sampah kawasa/desa/kelurahan <u>Sub Kegiatan</u> Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pasuruan	Sinergi dan koordinasi: 1. Kecamatan 2. Desa/Kelurahan 3. Pengelola kawasan
12		DLH	<u>Uraian</u> - ATK - Perjalanan dinas - Rapat koordinasi - Operasional kegiatan penanganan sampah insidentil (BBM insidentil) <u>Sub Kegiatan</u> Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab.Pasuruan dan Luar daerah	Sinergi dan koordinasi: 1. Kecamatan 2. Desa/Kelurahan 3. Pengelola kawasan 4. Provinsi Jawa Timur 5. Pemerintah Pusat
13	Potensi pencemaran lingkungan akibat kebakaran,	DLH	<u>Uraian</u> - Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan/	TPA Kenep	Sinergi dan koordinasi: 1. Kecamatan 2. Desa

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
	kebocoran lindi dan Gas Rumah Kaca ke kompartemen lingkungan dari TPA Kenep (Luas 2,9 Ha)		pemeliharaan infrastruktur di TPA Kenep <u>Sub Kegiatan</u> Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA		

Dalam menjalankan strategi **“Ruang Terbuka Hijau (RTH)”**, perlu disusun kegiatan secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049 serta peraturan lainnya terkait RTH di kabupaten Pasuruan, yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1	Luas RTH Eksisting yang terdata dan dikelola = 5,245 Ha	DLH	Penyusunan identifikasi RTH eksisting dan potensial	Kab. Pasuruan	Sinergi Bappelitbangda, DinasPUSDA, CK, TR, Dinas Permukiman.
	Luas target kawasan perkotaan untuk difungsikan sebagai RTH Publik = 10.781 Ha		Penambahan luasan RTH	Desa Parerejo, Desa Sungikulon, Kantor DPRD Kab. Pasuruan, Sepadan jalan Beji	Kantor Desa, Kecamatan, Instansi Vertikal yang mengelola sepadan jalan
			Pengelolaan RTH eksisting (dibersihkan, dirawat, disirami)	RTH teregister DLH	
			Pembinaan terhadap kecamatan dan desa terkait RTH	Kab. Pasuruan	Kantor Desa, Kecamatan, DPMD

Dalam menjalankan strategi **“pemulihan degradasi lahan”**, perlu disusun kegiatan secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049, yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1	Luasan Lahan kritis di Kabupaten Pasuruan	DLH	<i>Updating</i> pemetaan lahan kritis berbasis GIS	DLH Kab. Pasuruan	Sinergi Bappelitbangda, DinasPUSDA, CK, TR.
	90.866 Ha (terdiri dari klasifikasi agak kritis, potensial kritis, kritis dan sangat kritis)		Pelaksanaan <i>action learning</i> pada kecamatan prioritas dengan lahan kritis di daerah hulu	Kecamatan, Tosari, Kec. Tutar, Kec. Gempol	Sinergi dengan dinas kehutana Prov Jatim (CDK), pegiat lingkungan/kelompok tani hutan, BPBD
			Pelaksanaan <i>action learning</i> rehabilitasi wilayah pesisir	Kecamatan Lekok	Sinergi dengan DLH Prov Jatim, Dinas Perikanan, pegiat lingkungan, BPBD
			Rehabilitasi/ Konservasi lahan kritis di area tangkapan air	Daerah tangkapan air	Forum DAS dan partisipasi dari kewajiban perusahaan yang memiliki SIPA
			Pemantauan kegiatan usaha pertambangan dalam rangka penanggulangan/pemulihan kerusakan lahan	Daerah WIUP	Dinas ESDM Prov. Jatim, Satpol PP
			Lomba “tambang peduli reklamasi”	Daerah WIUP (sasaran pengusaha tambang di wilayah pasuruan)	Dinas ESDM Prov. Jatim, Satpol PP
		BPBD	Identifikasi daerah yang berpotensi terdampak bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor	Kab. Pasuruan	Sinergi DinasPUSDA, CK, TR, DLH, Kecamatan.
			Rehabilitasi lahan rawan bencana	Kab. Pasuruan	Sinergi DinasPUSDA, CK, TR, DLH, FORDAS

Dalam menjalankan strategi “**pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati (KEHATI)**”, perlu disusun kegiatan secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049, yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1	Konservasi keanekaragaman hayati Kab. pasuruan	DLH	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) keanekaragaman hayati Kab. Pasuruan	DLH Kab. Pasuruan	Sinergi DLH Prov Jatim, Bappelitbangda, DinasPUSDA, CK, TR.
			Sosialisasi, Pembinaan dan pendampingan Kampung Iklim sinergi dengan desa tangguh Bencana	Kabupaten Pasuruan	Sinergi DLH Prov Jatim, Dinas Pertanian, BPBD, Kecamatan, Dinas Peternakan, DPMD, Dinas perkim
			Inventarisasi MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kecamatan Tosari (Desa Tosari, Desa Baledono, Desa Wonokitri, Desa Mororejo, Desa Ngadiwono, Desa Podokoyo, Desa Kandangan, Desa Sedaeng)	Sinergi dengan DLH Prov Jatim, DPMD, Kecamatan.

Dalam menjalankan strategi “**pembangunan berbasis daya dukung lingkungan**”, perlu disusun kegiatan secara sistematis dengan berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2049, yaitu:

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
1	Pembangunan yang tidak mengindahkan daya dukung dan daya	DLH	Pembinaan, pemeriksaan serta proses persetujuan lingkungan	Kabupaten Pasuruan	Sasaran perusahaan/UMKM bersinergi dengan DLH Prov Jatim,

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
	tampung lingkungan hidup		(AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH, SPPL)		DinasPUSDA, CK, TR, DPMPSTP
			Pembinaan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Perusahaan dan/atau usaha kecil menengah di kab. Pasuruan	Sasaran perusahaan/UMKM bersinergi dengan DLH Prov Jatim, DinasPUSDA, CK, TR.
			Reviu RPPLH	DLH Kab. pasuruan	Sinergi dengan DLH. Prov jatim serta seluruh stake holder di Pasuruan
			Pengembangan aplikasi SILUET	DLH Kab. pasuruan	Sinergi dengan DLH. Prov jatim serta seluruh stake holder di Pasuruan, serta Kominfo.
			Penyusunan dan optimalisasi peran Dokumen informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	DLH Kab. pasuruan	Sinergi dengan DLH. Prov jatim serta seluruh stake holder di Pasuruan, serta Kominfo.
			Menyusun KLHS RDTR terkait dengan Review RDTR BWP Bangil, RDTR BWP Beji, RDTR BWP Kraton dan RDTR BWP Purwosari	DLH Kab. pasuruan	Sinergi dengan DLH. Prov jatim, Dinas PUSDA, CK, TR serta seluruh stake holder di Pasuruan.
			Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Ecopesantren, PROPER, serta pembinaan bagi pegiat lingkungan untuk meraih penghargaan kalpataru	Kabupaten Pasuruan	Sinergi dengan DLH. Prov jatim serta seluruh stake holder di Pasuruan, serta Kominfo.

No	Sumber & Besaran Masalah	OPD Pembina	Upaya Pengelolaan		
			Kegiatan	Lokasi	keterangan
			Pengujian Kualitas Udara	Kabupaten Pasuruan (mewakili kawasan industri, transportasi, pemukiman dan perkantoran)	Sinergi dengan KLHK DLH. Prov jatim, Dishub, Dinas Perkim
		ATR-BPN	Analisa, perencanaan dan pengendalian Luas wilayah berdasarkan klasifikasi perubahan penggunaan lahan pertanian, Luas wilayah menurut tanag geologi dan luas lahan kering	Kabupaten Pasuruan	Sinergi dengan Bappelitbangda, Dinas PUSDA, CK, TR, DLH, Dinas Pertanian.

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah tahun 2025

Prioritas pembangunan Daerah tahun 2025 yaitu "peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat" serta "Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan intervensi melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Persampahan

Pelayanan persampahan menjadi pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)

Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Pasuruan akan meningkatkan kualitas air dan udara yang merupakan bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kualitas air permukaan dan udara yang bersih dan sehat akan berdampak pada akses pelayanan dasar masyarakat.

Tabel 3.3

IKU	Tema 2025	Prioritas Pembangunan		Subkegiatan	Kegiatan	Program	Proyek Strategis
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif	Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	Ruang Terbuka Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rehabilitasi Alun-Alun Bangil
Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3			Pengelolaan sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Optimalisasi Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Wonokerto
			Pengelolaan sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Rehabilitasi Eks TPA Kenep
Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal	Ketahanan daerah / Kualitas Lingkungan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian informasi dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan usaha di kawasan peternakan Sapi Susu di Lekok dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya
			Ketahanan daerah / Kualitas Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Koordinasi rehabilitasi pencemaran sungai akibat kegiatan peternakan sapi kawasan pengembangan lainnya
			Ketahanan daerah / Kualitas Lingkungan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Koordinasi upaya Rehabilitasi Lahan Kritis pada daerah hulu atau wilayah tangkapan air (<i>catchment area</i>)
Persentase Upaya Penataan Lingkungan		Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal	Ketahanan daerah / Kualitas Lingkungan	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Air Kabupaten Pasuruan
							Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Penyedia Lahan dan Pangan Kabupaten Pasuruan

3.3.3 Program Kegiatan dan Sub kegiatan pendukung proyek strategis tahun 2025

Berdasarkan uraian prioritas pembangunan dan proses perumusan proyek strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, maka beberapa proyek strategis lingkup urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Optimalisasi TPA (Tempat pemrosesan Akhir) Wonokerto

Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA berskala Kabupaten Pasuruan yang ada dan berfungsi saat ini adalah TPA Wonokerto di Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar 4,8 Ha. TPA Wonokerto memiliki kapasitas sebesar 2.000.000 m³ dan saat ini menampung volume eksisting tahun 2023 yaitu 400.000 m³. berdasarkan posisi hanya efisien untuk melayani wilayah bagian Utara-Barat Kabupaten Pasuruan (Kec. Beji, Gempol, Bangil, Kraton, Rembang, Pohjentrek dan Pandaan).

Saat ini kondisi operasional di TPA Wonokerto khususnya sel 1 sudah overload, sehingga sesuai dengan DED pembangunan TPA Wonokerto, maka untuk meningkatkan pelayanan persampahan membutuhkan pembangunan sel 2 serta membutuhkan tambahan sarana dan prasarana pendukungnya atau optimalisasi TPA Wonokerto.

Proyek optimalisasi TPA Wonokerto dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.

2. Rehabilitasi Alun-alun Bangil

Berdasarkan data tahun 2023 tentang jumlah luasan ruang terbuka hijau publik mencapai 9,4 ha atau 0,00639% dari total luas Kabupaten Pasuruan. Hal ini belum memenuhi ketentuan jumlah luasan ruang terbuka hijau publik yang harus dicapai sebesar 30% dari total luas lahan. Selain luasan RTH yang kurang, terdapat RTH yang selain berfungsi sebagai kawasan resapan air juga merupakan landmark Kabupaten Pasuruan yaitu Alun-alun Bangil, dimana kondisinya kurang optimal sebagai perwujudan landmark, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi Alun-alun Bangil untuk menunjang Kecamatan Bangil sebagai Ibu kota Kabupaten.

Proyek rehabilitasi Alun-alun Bangil dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati dan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang terbuka Hijau.

3. Rehabilitasi lahan kritis

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu 46,76 poin, nilai ini menunjukkan kondisi “KURANG”, dimana sebaran tutupan lahan yang kurang banyak terdapat di kawasan hulu atau daerah penyangga, sehingga banyak fenomena bencana banjir bandang pada tahun 2023 maupun awal tahun 2024.

Rehabilitasi lahan kritis dengan melibatkan lintas sektor serta berbasis pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk pengendalian bencana banjir.

Proyek rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup dan Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi.

Tabel 3.4 Matrik Perencanaan Pembangunan Tahunan pada RKPD Tahun 2024-2026													
No	Uraian Proyek Strategis	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Keterangan
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik) **)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rehabilitasi Alun-Alun Bangil	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan kabupaten pasuruan	800 Ha	Rp 13.012.550.000,00	DAU / DBCHT	(-7.597150782339305, 112.7846005)	Kauman	BANGIL	Lanjutan dari pekerjaan rehabilitasi Alun-alun Bangil tahun 2024 (anggaran 958.662.000)
2	Optimalisasi Pemrosesan Akhir Sampah di TPA Wonokerto	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	11 Unit	Rp 21.000.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.640517885513283, 112.76605249098678)	Dusun Jati, Desa Wonokerto	SUKOREJO	Optimalisasi TPA Wonokerto : Penambahan Sel Sampah, Perbaikan Kolam Lindi, Optimalisasi instalasi gas methan, Penambahan jaringan drainase, Pembuatan buffer zone / RTH TPA, Pembuatan plengsengan dan pagar keliling
													Pengadaan Alat Berat : Excavator, Bulldozer, Backhoe Loader
													Reviu desain / Perencanaan Optimalisasi TPA Wonokerto
													Pengawasan Optimalisasi TPA Wonokerto
													Pengadaan TPA Baru : Feasibility Study (FS) Lokasi TPA Baru
3	Rehabilitasi Eks TPA Kenep	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan sampah	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	42599 ton	Rp 5.000.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.60904454260447, 112.75728121811466)	Kenep	BEJI	REHABILITASI EKS TPA KENEP
4	Pemberian informasi dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan usaha di kawasan peternakan Sapi Susu di Lekok dan kawasan pengembangan ekonomi lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 laporan	Rp 75.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.678707164239882, 112.99664862404258)	Balunganyar	LEKOK	Pemberian Informasi Sumber Pencemar Institusi/Non Institusi (peternak sapi di Lekok)
5	Koordinasi rehabilitasi pencemaran sungai akibat kegiatan peternakan sapi kawasan pengembangan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 kegiatan	Rp 50.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.678707164239882, 112.99664862404258)	Balunganyar	LEKOK	Koordinasi rehabilitasi pencemaran sungai akibat peternakan sapi
6	Koordinasi upaya Rehabilitasi Lahan Kritis pada daerah hulu atau wilayah tangkapan air (catchment area)	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Rp 724.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.895159749422622, 112.91202352420645)	beberapa Desa di kawasan Hulu	beberapa Kecamatan di Kawasan Hulu	koordinasi rehabilitasi lahan kritis baik di lahan yg menjadi kewenangan Kabupaten, maupun Instansi Vertikal di daerah tangkapan air, kawasan lindung dan kawasan konservasi untuk mencegah kerusakan lahan dan terjadinya bencana
7	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) untuk menunjang rencana Pengembangan kawasan Agropolitan, agrominapolitan dll	Dinas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 200.000.000,00	DAU / DBCHT	(-7.609531408448831, 112.8277616242032)	Raci	BANGIL	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Air Kabupaten Pasuruan
								Rp 200.000.000,00					Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Penyedia Lahan dan Pangan Kabupaten Pasuruan

3.3.4 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Inovasi Perangkat daerah

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan optimalisasi 10 (sepuluh) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3 dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH, Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH, Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan LH untuk Masyarakat. optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan lintas sektor.

Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut diberi nama SILUET yang dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021, serta YUK SALIMAH yaitu inovasi pengelolaan sampah.

Sistem Informasi Lingkungan dan Ekosistem Terpadu (SILUET) merupakan sebuah media publikasi data dan informasi lingkungan hidup terintegrasi di wilayah Kabupaten Pasuruan yang disajikan dalam bentuk informasi geospasial berbasis lokasi yang dapat diunduh dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini dikembangkan sebagai manifestasi visi Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan “Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing.

Yuk Salimah (Yuk Kelola Sampah dan Limbah Menjadi Berkah). Permasalahan sampah menjadi perhatian serius bagi banyak pihak di seluruh dunia, dan di Kabupaten Pasuruan pun hal ini tidak luput dari perhatian. Berbagai langkah luar biasa telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, dan semua upaya tersebut patut diapresiasi Tujuannya untuk memperkuat komitmen dan peran aktif kepada masyarakat. Dan juga untuk membangun rantai perekonomian pemukiman dan juga industri.

Tabel 3.5				
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah				
Tahun 2025				
Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
YUK SALIMAH	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 6.000.000,00
SILUET	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 65.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai acuan bagi OPD yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah :

1. Dinas / Instansi / Organisasi terkait pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
2. Masyarakat / Pemerhati / Komunitas pegiat lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan;
3. Masyarakat lingkungan sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Industri / usaha / UMKM yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan atau perusak di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pasuruan										
Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10) (11)
2.11.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%		9.582.663.720			100% 16.578.886.572
2.11.01.2.01	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana,anggaran, dan evaluasi	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dokumen		100%		3.391.200			100% 262.970.927
2.11.01.2.01.0001	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Pasuruan	3 dokumen	Belanja Operasi : 1.720.900 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.720.900 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	1.720.900	DAU	3 dokumen	159.451.219,00
2.11.01.2.01.0002	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : 183.600 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 183.600 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	183.600	DAU	2 dokumen	19.048.333
2.11.01.2.01.0003	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : 122.400 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 122.400 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	122.400	DAU	2 dokumen	11.604.740
2.11.01.2.01.0004	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : 165.300 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 165.300 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	165.300	DAU	2 dokumen	16.882.214
2.11.01.2.01.0005	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : 97.800 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 97.800 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	97.800	DAU	2 dokumen	11.604.740

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.01.0006	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	4 laporan	122.400 Belanja Operasi : 122.400 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 122.400 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		4 laporan	11.716.373
2.11.01.2.01.0007	7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	3 laporan	978.800 Belanja Operasi : 978.800 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 978.800 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		3 laporan	32.663.308
2.11.01.2.02	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan		100%	9.408.196.105			100%	11.910.435.001
2.11.01.2.02.0001	8 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Orang yang Menerima Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kab. Pasuruan	73 orang- bulan	8.710.363.221 Belanja Operasi : 8.710.363.221 - Belanja Pegawai 8.710.363.221 - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		80 orang- bulan	7.934.849.671
2.11.01.2.02.0002	9 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	36 dokumen	697.157.284 Belanja Operasi : 697.157.284 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 697.157.284 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		36 dokumen	3.906.909.207
2.11.01.2.02.0004	10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Koordinasi dari Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pasuruan	6 dokumen	244.800 Belanja Operasi : 244.800 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 244.800 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 dokumen	15.869.699
2.11.01.2.02.0007	11 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pasuruan	19 laporan	430.800 Belanja Operasi : 430.800 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 430.800 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		19 laporan	38.404.672

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.02.0008	12 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya kualitas Dokumen Pelaporan dan AnalisisnPrognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisnPrognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	14.401.752
2.11.01.2.03	3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan /dokumen BMD yang akurat dan sesuai dengan ketentuan	Persentase laporan/dokumen BMD yg akurat dan sesuai dengan ketentuan		100%	991.420			100%	62.407.592
2.11.01.2.03.0001	13 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		7 dokumen	19.202.336
2.11.01.2.03.0002	14 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya kualitas Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasuruan	6 dokumen	991.420 Belanja Operasi : 991.420 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 991.420 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 dokumen	43.205.256
2.11.01.2.05	4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan		100%	600.000			100%	190.376.761
2.11.01.2.05.0001	15 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Pasuruan	0 unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		355 unit	137.359.111
2.11.01.2.05.0009	16 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pasuruan	20 orang	600.000 Belanja Operasi : 600.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 600.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		20 orang	53.017.650
2.11.01.2.06	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan umum PD	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD		100%	8.933.900			100%	1.525.169.715
2.11.01.2.06.0001	17 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	5 paket	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		10paket	336.167.626

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.06.0002	18 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	6 paket	1.366.000 Belanja Operasi : 1.366.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.366.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 paket	542.900.992
2.11.01.2.06.0003	19 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pasuruan	20 paket	780.000 Belanja Operasi : 780.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 780.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		8 paket	48.005.841
2.11.01.2.06.0004	20 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	9 paket	735.000 Belanja Operasi : 735.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 735.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		9 paket	60.120.685
2.11.01.2.06.0005	21 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 paket	1.144.900 Belanja Operasi : 1.144.900 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.144.900 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 paket	81.554.242
2.11.01.2.06.0007	22 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Pasuruan	0 paket	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 paket	38.404.672
2.11.01.2.06.0008	23 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	12 laporan	520.000 Belanja Operasi : 520.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 520.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 laporan	49.080.403

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.06.0009	24 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	12 laporan	4.288.000 Belanja Operasi : 4.288.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 4.288.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 laporan	368.935.254
2.11.01.2.07	6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan BMD yang terealisasi	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi		100%	7.818.495			100%	1.488.153.059
2.11.01.2.07.0001	25 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	0 unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 unit	498.986.916
2.11.01.2.07.0002	26 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 unit	495.144.721
2.11.01.2.07.0005	27 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Meningkatnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pasuruan	0 unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		10 unit	108.845.658
2.11.01.2.07.0006	28 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	5 unit	4.500.495 Belanja Operasi : 4.500.495 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 4.500.495 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		5 unit	35.213.436
2.11.01.2.07.0010	29 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	18 unit	3.318.000 Belanja Operasi : 3.318.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 3.318.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : -	DAU		18 unit	349.962.328

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Belanja Transfer : -				
2.11.01.2.08	7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	142.562.000			100%	416.572.168
2.11.01.2.08.0002	30 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	48 laporan	141.800.000 Belanja Operasi : 141.800.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 141.800.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		48 laporan	336.167.627
2.11.01.2.08.0004	31 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	5 laporan	762.000 Belanja Operasi : 762.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 762.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		5 laporan	80.404.541
2.11.01.2.09	8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD kondisi baik	Persentase BMD kondisi baik		100%	10.170.600			100%	722.801.349
2.11.01.2.09.0002	32 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	6 unit	6.182.600 Belanja Operasi : 6.182.600 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 6.182.600 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 unit	436.509.734
2.11.01.2.09.0005	33 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Meningkatnya Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	12 unit	100.000 Belanja Operasi : 100.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 100.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 unit	1.108.935
2.11.01.2.09.0006	34 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	8 unit	750.000 Belanja Operasi : 750.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 750.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		8 unit	35.751.534
2.11.01.2.09.0009	35 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	2.376.000 Belanja Operasi : 2.376.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 2.376.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 unit	213.469.971

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.01.2.09.0010	36 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 unit	762.000 Belanja Operasi : 762.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 762.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 unit	35.961.175
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	UP Bidang Lingkungan Hidup									
2.11.02	2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Kab. Pasuruan	66,67%	7.007.650			66,67%	1.151.289.013
	9 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatkan penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup alam	Persentase penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam	Kab. Pasuruan	62,71%	3.270.450			66,10%	655.601.173
2.11.02.2.01.0002	37 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 dokumen	3.001.500 Belanja Operasi : 3.001.500 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 3.001.500 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	288.849.612
2.11.02.2.01.0003	38 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Kab. Pasuruan	1 dokumen	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	66.751.561
2.11.02.2.01.0006	39 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kaupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas dokumen PPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kab. Pasuruan	3 dokumen	268.950 Belanja Operasi : 268.950 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 268.950 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.02.2.02	10 Kegiatan Penyeleggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Meningkatkan efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase efektivitas KLHS dalam upaya perlindungan lingkungan hidup		60%		3.737.200			66,67%	495.687.840
2.11.02.2.02.0002	40 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Meningkatnya kualitas dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pasuruan	1 dokumen	Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	-	DAU		0 dokumen	
2.11.02.2.02.0005	41 Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Meningkatnya kualitas Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Pasuruan	2 dokumen	Belanja Operasi : 3.737.200 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 3.737.200 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	3.737.200	DAU		2 dokumen	495.687.840
2.11.03	3 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara serta luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air dan udara	Kab. Pasuruan	60%	1.905.483.200				65%	2.652.939.270
			Persentase meningkatnya luasan lahan yang telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis		50%					60%	
	11 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah,air,udara,dan laut dan sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan	persentase dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Kab. Pasuruan	100%	-				100%	
2.11.03.2.01			persentase sektor dokumen inventarisasi GRK yang dilaksanakan		80%	1.493.943.200				100%	1.782.843.369
2.11.03.2.01.0001	42 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Meningkatnya kualitas Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air,Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pasuruan	120 dokumen	Belanja Operasi : 1.420.074.500 - Belanja Pegawai 20.074.500 - Belanja Barang & Jasa 20.074.500 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 1.400.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	1.420.074.500	DAU dan DAK		119 dokumen	416.164.414
2.11.03.2.01.0002	43 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	4 dokumen	Belanja Operasi : 1.894.700 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.894.700 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	1.894.700	DAU		5 dokumen	161.422.531

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.03.2.01.0015	44 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengambilan Contoh Uji,Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kab. Pasuruan	1204 dokumen	71.974.000 Belanja Operasi : 71.974.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 71.974.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1254 dokumen	1.205.256.424
2.11.03.2.02	12 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kab. Pasuruan	6%	4.933.300			7%	403.185.752
2.11.03.2.02.0001	45 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Meningkatnya kualitas Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	60 laporan	4.266.900 Belanja Operasi : 4.266.900 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 4.266.900 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		70 laporan	368.598.739
2.11.03.2.02.0003	46 Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kab. Pasuruan	4 titik	666.400 Belanja Operasi : 666.400 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 666.400 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		4 titik	34.587.013
2.11.03.2.03	13 Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		29%	406.606.700			35%	466.910.149
2.11.03.2.03.0007	47 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	0 kegiatan	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 kegiatan	31.622.412
2.11.03.2.03.0008	48 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Meningkatnya Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	0 kegiatan	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 kegiatan	31.622.412

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.03.2.03.0012	49 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dikabupaten/kota	Meningkatkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	0 kegiatan	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 kegiatan	24.705.009
2.11.03.2.03.0013	50 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Meningkatkan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kab. Pasuruan	12 kegiatan	406.606.700 Belanja Operasi : 406.606.700 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 406.606.700 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU dan DBHCHT		16 kegiatan	378.960.316
2.11.04	4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Meningkatnya Luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	Persentase peningkatan luasan RTH publik (minimal 20% wilayah perkotaan di Kab. Pasuruan)	Kab. Pasuruan	9,35%	7.417.684.597			10%	4.636.834.851
2.11.04.2.01	14 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Luasan RTH publik dalam satu tahun	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	Kab. Pasuruan	17,65%	7.417.684.597			22%	4.636.834.851
2.11.04.2.01.0001	51 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kab. Pasuruan	2 dokumen	2.300.000 Belanja Operasi : 2.300.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 2.300.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	3.801.190.281
2.11.04.2.01.0004	52 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	850 ha	7.415.384.597 Belanja Operasi : 713.884.597 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 713.884.597 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 6.701.500.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU dan DBHCHT		900 ha	751.173.675
2.11.04.2.01.0009	53 Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Meningkatnya Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	0 unit	- Belanja Operasi : - - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa - - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		0 unit	84.470.895

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.05	5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 15 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan Meningkatnya pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3	Prosentase Pendampingan/ Pembinaan/ Sosialisasi pengelolaan B3 dan LB3 di Wilayah Kabupaten Pasuruan Persentase pemenuhan pesyaratan teknis penyimpanan Limbah B3		67%	5.201.840			100%	621.694.595
2.11.05.2.01					100%	3.275.483			100%	219.848.066
2.11.05.2.01.0001	54 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	30 dokumen	2.815.342 Belanja Operasi : 2.815.342 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 2.815.342 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		30 dokumen	119.523.819
2.11.05.2.01.0002	55 Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Meningkatnya kualitas Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Pasuruan	30 laporan	460.141 Belanja Operasi : 460.141 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 460.141 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		30 laporan	100.324.247
2.11.05.2.02	16 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya pembinaan pengumpulan Limbah B3	Persentase pembinaan pengumpulan Limbah B3		100%	1.926.357			100%	401.846.529
2.11.05.2.02.0001	56 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatnya kualitas Fasilitas Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teritegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pasuruan	1 dokumen	44.232 Belanja Operasi : 44.232 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 44.232 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	4.108.570
2.11.05.2.02.0002	57 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab. Pasuruan	3 dokumen	1.882.125 Belanja Operasi : 1.882.125 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.882.125 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		3 dokumen	397.737.959

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.06	6 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Menurunnya pelanggaran Penanggunjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggunjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Persentase Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan		47%	7.616.321			40%	1.155.880.330
2.11.06.2.01	17 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbtkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				16,38%	7.616.321			17,52%	1.155.880.330
2.11.06.2.01.0001	58 Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Meningkatnya Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, Dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab. Pasuruan	30 dokumen	Belanja Operasi : 2.386.921 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 2.386.921 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		45 dokumen	520.612.067
2.11.06.2.01.0005	59 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pasuruan	16 laporan	Belanja Operasi : 4.654.900 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 4.654.900 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		17 badan usaha	595.474.657
2.11.06.2.01.0007	60 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kapasitas PPLHD	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Pasuruan	6 orang	Belanja Operasi : 574.500 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 574.500 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		6 orang	39.793.606

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.07	7 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang 18 Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Masyarakat Hukum Adat yang diakui sesuai dengan usulan Masyarakat Hukum Adat	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA		33%	1.028.400			42%	84.232.202
2.11.07.2.01		Meningkatnya jumlah MHA yang diakui	Jumlah MHA yang diakui		11embaga	612.000			11embaga	34.570.909
2.11.07.2.01.0001	61 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab. Pasuruan	10 dokumen	612.000 Belanja Operasi : 612.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 612.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		12 dokumen	34.570.909
2.11.07.2.02	19 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Meningkatnya jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah MHA yang mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas		31embaga	416.400			41embaga	49.661.293
2.11.07.2.02.0001	62 Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kab. Pasuruan	3 dokumen	416.400 Belanja Operasi : 416.400 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 416.400 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		4 dokumen	49.661.293

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.08	8 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga Sekolah,Perusahaan ,Ponpes,Kemasyarakatan	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		7,54%	82.044.000			10%	468.655.083
2.11.08.2.01	20 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya		95 lembaga	82.044.000			103 lembaga	468.655.083
2.11.08.2.01.0002	63 Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pendampingan Pembinaan Gerak Pedili dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Pasuruan	4 dokumen	82.044.000 Belanja Operasi : 82.044.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 82.044.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU SG		4 dokumen	468.655.083
2.11.09	9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik		3,17%	856.800			3%	152.132.242
2.11.09.2.01	21 Kegiatan Pemberian Penghargaan LH Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH sesuai standar		4,93%	856.800			5,28%	152.132.242
2.11.09.2.01.0001	64 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan LH	Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Pasuruan	4 entitas	856.800 Belanja Operasi : 856.800 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 856.800 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		4 entitas	152.132.242
2.11.10	10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Persentase Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten		100%	1.754.600			100%	160.318.551
2.11.10.2.01	22 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan	Persentase jumlah penanganan pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten yang diselesaikan		100%	1.754.600			100%	160.318.551
2.11.10.2.01.0004	65 Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kab. Pasuruan	12 pengaduan	1.197.500 Belanja Operasi : 1.197.500 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.197.500 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		15 dokumen	127.541.957

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.10.2.01.0005	66 Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Meningkatnya Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Pasuruan	6 perkara	557.100 Belanja Operasi : 557.100 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 557.100 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		15 dokumen	32.776.594
2.11.11	11 Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya capaian pengurangan dan penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	Persentase capaian pengurangan sampah		78%	9.987.654.374			82%	21.774.889.208
2.11.11.2.01	22 Kegiatan Pengelolaan Sampah	Meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA		43,7%				55%	
			Persentase capaian pengurangan sampah		23,40%	9.987.654.374			25%	21.774.889.208
			Persentase capaian penanganan sampah		30,60%				38%	
2.11.11.2.01.0004	67 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	MeningkatnyaMasyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Pasuruan	33 kelompok	4.223.013 Belanja Operasi : 4.223.013 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 4.223.013 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		33 kelompok	300.108.056
2.11.11.2.01.0005	68 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kab. Pasuruan	1 dokumen	1.809.000 Belanja Operasi : 1.809.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.809.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		1 dokumen	28.937.389
2.11.11.2.01.0007	69 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Pasuruan	12 unit	7.761.500.000 Belanja Operasi : 1.411.500.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.411.500.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 6.350.000.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU dan DBHCHT		18 unit	10.814.709.187
	70 Sub Kegiatan Penyusunan rencana ,kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Pasuruan	2 dokumen	1.224.061 Belanja Operasi : 1.224.061 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 1.224.061 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		2 dokumen	1.284.701
2.11.11.2.01.0015	71 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Pasuruan	12 unit	2.043.470.729 Belanja Operasi : 134.150.729 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 134.150.729 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 1.909.320.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU dan DAK		38 unit	3.491.047.136

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.11.11.2.01.0017	72 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R ,PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan,biodigister,bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Meningkatnya sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R ,PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan,biodigister,bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R ,PDU, TPST, TPS,SPA, PSEL/PLTsa,RDF, pusat pengomposan,biodigister,bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pasuruan	127798 ton	Belanja Operasi : 97.665.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 97.665.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		111466 ton	1.000.000.000
2.11.11.2.01.0019	73 Sub Kegiatan pengurangan sampah melalui pendaurulangan sampah	Meningkatnya sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Kab. Pasuruan	99683 ton	Belanja Operasi : 18.558.571 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 18.558.571 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -			100 ton	5.138.802.739
2.11.11.2.01.0020	7 Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Meningkatnya Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST regional	Kab. Pasuruan	8591 ton	Belanja Operasi : 59.204.000 - Belanja Pegawai - - Belanja Barang & Jasa 59.204.000 - Belanja Hibah - Belanja Modal : - Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -	DAU		8591 ton	1.000.000.000
						Belanja Operasi : 12.638.175.502 - Belanja Pegawai 8.710.363.221 - Belanja Barang & Jasa 3.927.812.281 - Belanja Hibah - Belanja Modal : 16.360.820.000 Belanja Tidak Terduga : - Belanja Transfer : -				
						Total Belanja PD : 28.998.995.502,00	-	-	-	49.437.751.917

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Kode sub kegiatan, kinerja sub kegiatan dan indikator sub kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun dari stakeholder terkait diupayakan dapat tertampung lewat Musrenbang Kecamatan ataupun melalui Forum Perangkat Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang dapat menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Disamping itu, penyusunan Renja Tahun 2025 ini merupakan bagian dari alur pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perangkat Daerah karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 1. Penyusunan RKA ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

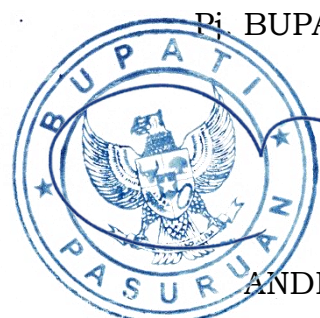
1. Seluruh Pejabat dan Staf pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan atau optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala BAPPELITBANGDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Hasil pemantauan dan supervise digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dana indikatif dan indiator kinerja serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA dengan Renja Perangkat Daerah.

Pi. BUPATI PASURUAN,



ANDRIYANTO